BAPPEDA & LITBANG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

ANALISIS EKONOMI MAKRO

PROVINSI KALIMANTAN UTARA

TAHUN 2023



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dengan telah tersusunnya Buku Analisis Ekonomi Makro Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023. Penyusunan Analisis Ekonomi Makro Provinsi Kalimantan Utara ini ditujukan untuk menyediakan data dan analisis kondisi ekonomi tahun 2018-2022 dengan menggunakan data ekonomi makro. Di samping itu, juga dilakukan proyeksi indikator ekonomi Provinsi Kalimantan Utara tahun 2023-2024 dengan menggunakan data PDRB, struktur ekonomi, laju pertumbuhan ekonomi, Indeks Williamson, IPM, kemiskinan, indeks gini, ketenagakerjaan, inflasi, investasi dan ICOR (Incremental Capital Output Ratio).

Hasil analisis diharapkan dapat memberikan masukan penting bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam pelaksanaan, perbaikan dan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada periode selanjutnya. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berperan dalam penyusunan buku ini. Kami juga mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna perbaikan dan penyempurnaan buku ini di masa mendatang. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi pembaca.

Tanjung Selor, Desember 2023

Plt. Kepala Bappeda dan Litbang
Provinsi Kalimantan Utara

Bertius, S.Hut.

Analisis Ekonomi Makro Provinsi Kalimantan Utara

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iv
DAFTAR GAMBAR v
BAB 1 PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Maksud dan Tujuan 2
1.3 Manfaat 3
1.4 Ruang Lingkup Penelitian 3
BAB 2 LANDASAN TEORI 4
2.1 Konsep Ekonomi Makro 4
2.2 Indikator Ekonomi Makro 4
2.1.1 Produk Domestik Regional Bruto 4
2.1.2 Struktur Ekonomi 6
2.1.3 Laju Pertumbuhan Ekonomi 7
2.1.4 Indeks Williamson 8
2.1.5 Indeks Pembangunan Manusia 8
2.1.6 Kemiskinan 11
2.1.7 Indeks Gini 14
2.1.8 Ketenagakerjaan 16
2.1.9 Inflasi 19
2.1.10 Investasi 21
2.1.11 ICOR 28
BAB 3 METODE PENELITIAN 32
2.3 Metode Pengumpulan Data 32
2.4 Metode Pengolahan dan Analisis Data 33
BAB 4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN 38
4.1 Produk Domestik Regional Bruto 38
4.2 Struktur Ekonomi 39
4.3 Laju Pertumbuhan Ekonomi 41
4.4 Indeks Williamson 46
4.5 Indeks Pembangunan Manusia 48

Analisis Ekonomi Makro Provinsi Kalimantan Utara

4.6 Kemiskinan 52
4.7 Indeks Gini 53
4.8 Ketenagakerjaan 54
4.9 Inflasi 56
4.10 Investasi 58
4.11 ICOR 59
BAB 5 PROYEKSI 61
5.1 Produk Domestik Regional Bruto 61
5.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi 63
5.3 Indeks Williamson 64
5.4 Indeks Pembangunan Manusia 65
5.5 Kemiskinan 66
5.6 Indeks Gini 66
5.7 Tingkat Pengangguran Terbuka 67
5.8 Inflasi 68
5.9 Investasi 69
5.10 ICOR 70
BAB 6 KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN 72
6.1 Kesimpulan 72
6.2 Implikasi Kebijakan 74
DAFTAR PUSTAKA 76

Analisis Ekonomi Makro Provinsi Kalimantan Utara

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Distribusi Persentase PDRB Kalimantan Utara Menurut Lapangan Usaha 2018-2022 (Persen) 40
Tabel 4.2 Laju Pertumbuhan PDRB Kalimantan Utara Menurut Lapangan Usaha 2018-2022 (Persen) 43
Tabel 4.3 Garis Kemiskinan Menurut Daerah Kota dan Desa Tahun 2018-2022 (Rupiah/Kapita/Bulan) 53
Tabel 4.4 Status Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018-2022 54
Tabel 4.5 Besarnya Investasi Provinsi Kalimantan Utara Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2018-2022 58
Tabel 4.6 Besarnya Investasi dan ICOR Provinsi Kalimantan Utara ADHK Tahun 2018-2022 60
Tabel 5.1 Hasil Proyeksi PDRB ADHK Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023-2024 (Triliun Rupiah) 61
Tabel 5.2 Hasil Proyeksi PDRB ADHB Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023-2024 (Triliun Rupiah) 62
Tabel 5.3 Hasil Forecasting LPE Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023-2024 (Persen) 63
Tabel 5.4 Hasil Forecasting Indeks Williamson Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023-2024 64
Tabel 5.5 Hasil Forecasting IPM Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023-2024 65
Tabel 5.6 Hasil Forecasting Persentase Penduduk Miskin Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023-2024 66
Tabel 5.7 Hasil Forecasting Indeks Gini Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023-2024 67
Tabel 5.8 Hasil Forecasting TPT Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023-2024 68
Tabel 5.9 Hasil Forecasting Inflasi Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023-2024 68
Tabel 5.10 Hasil Forecasting Investasi (ADHB) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023-2024 69
Tabel 5.11 Hasil Forecasting Investasi (ADHK) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023-2024 69
Tabel 5.12 Hasil Forecasting ICOR Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023-2024 70

Analisis Ekonomi Makro Provinsi Kalimantan Utara

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kriteria Penilaian Indeks Williamson 8
Gambar 2.2 Kurva Lorenz 15
Gambar 2.3 Diagram Ketenagakerjaan 16
Gambar 4.1 Perkembangan Nominal PDRB Provinsi Kalimantan Utara 2018-2022 (Triliun Rupiah) 39
Gambar 4.2 Struktur Perekonomian Kalimantan Utara Tahun 2022 40
Gambar 4.3 Laju Pertumbuhan PDRB Kalimantan Utara Tahun 2018-2022 45
Gambar 4.4 Capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Utara dengan Laju Pertumbuhan Nasional 46
Gambar 4.5 Indeks Williamson Kalimantan Utara Tahun 2018-2022 47
Gambar 4.6 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018-2022 48
Gambar 4.7 AHH Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018-2022 49
Gambar 4.8 HLS Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018-2022 50
Gambar 4.9 RLS Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018-2022 51
Gambar 4.10 RLS Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018-2022 51
Gambar 4.11 Persentase Penduduk Miskin Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018-2022 52
Gambar 4.12 Perbandingan Indeks Gini Provinsi Kalimantan Utara dengan Nasional Tahun 2018-2022 53
Gambar 4.13 Perbandingan TPT Provinsi Kalimantan Utara dengan Nasional Tahun 2018-2022 56
Gambar 4.14 Perkembangan Inflasi Provinsi Kalimantan Utara dengan Nasional Tahun 2018-2022 57
Gambar 5.1 Hasil Forecasting Indeks Williamson Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023-2024 64

Analisis Ekonomi Makro Provinsi Kalimantan Utara

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pembangunan dapat berupa sistem pemberdayaan sumber daya yang terbatas secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempertahankan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan dalam jangka panjang. Secara tradisional, pembangunan adalah peningkatan Produk Domestik Bruto di suatu wilayah yang berlangsung secara berkelanjutan (Kuncoro, 2004). Berdasarkan definisi-definisi tersebut dapat diketahui bahwa pembangunan tidak dapat terlepas dari aspek perekonomian karena aktivitas pembangunan sangat identik dengan aktivitas pembangunan ekonomi.

Pembangunan ekonomi adalah proses peningkatan pendapatan total dibandingkan dengan pendapatan per kapita dengan mempertimbangkan adanya peningkatan jumlah penduduk dan perubahan struktur ekonomi suatu wilayah. Pembangunan ekonomi merupakan salah satu indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat pembangunan di suatu daerah tertentu. Pembangunan ekonomi dilakukan sebagai langkah untuk melakukan pemerataan pembangunan guna mewujudkan masyarakat yang adil dan merata. Peningkatan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah merupakan tujuan akhir dari proses pembangunan sehingga pemerintah harus memastikan bahwa proses pembangunan berjalan dengan baik sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terwujud. Upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memastikan berlangsungnya pembangunan yang baik adalah melalui perencanaan pembangunan yang baik pula.

Sejak diberlakukannya desentralisasi atau otonomi daerah maka setiap pemerintah daerah bertanggung jawab untuk dapat membangun dan mengembangkan daerahnya sesuai dengan kemampuan sumber dayanya masing-masing. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diketahui bahwa salah satu tugas utama kepala daerah selain memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

Analisis Ekonomi Makro Provinsi Kalimantan Utara

daerah, juga menyusun dan mengajukan dokumen rencana pembangunan dan anggaran belanja daerah baik pada jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Dengan demikian, kepala daerah memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung peningkatan kondisi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Ada beberapa rencana pembangunan yang disusun dalam jangka waktu tertentu, antara lain Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yaitu dalam periode 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dalam periode 5 tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam periode tahunan. RPJMD disusun berdasarkan perwujudan visi dan misi kepala daerah terpilih yang dikembangkan menjadi visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Pembangunan daerah ditujukan untuk berbagai aspek kehidupan masyarakat termasuk pembangunan ekonomi mengingat tingkat perekonomian yang baik merupakan indikator utama kemajuan suatu daerah. Suatu daerah dapat dikatakan sebagai daerah maju apabila memiliki pertumbuhan ekonomi yang positif dan terus meningkat dari tahun ke tahun yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Provinsi Kalimantan Utara selaku unit kerja yang menentukan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah perlu melakukan analisis ekonomi makro untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai kondisi ekonomi di Provinsi Kalimantan Utara. Analisis ekonomi makro juga perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana capaian indikator ekonomi dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam RPJMD. Analisis ekonomi makro Provinsi Kalimantan Utara perlu dilakukan secara berkala dan akurat agar hasil analisis yang diperoleh dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi daerah.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dari kegiatan penyusunan Analisis Ekonomi Makro Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023 ini adalah untuk menyediakan data dan analisis ekonomi Provinsi Kalimantan Utara secara makro dalam perencanaan

Analisis Ekonomi Makro Provinsi Kalimantan Utara

pembangunan. Sementara itu, tujuan dari kegiatan penyusunan Analisis Ekonomi Makro Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a. Mengumpulkan data dan informasi tentang kondisi ekonomi makro Provinsi Kalimantan Utara tahun 2018-2022;
b. Mengetahui angka proyeksi indikator ekonomi makro Provinsi Kalimantan Utara tahun 2023-2024;
c. Menyusun rekomendasi kebijakan yang perlu dilakukan untuk mendukung pembangunan ekonomi Provinsi Kalimantan Utara.

1.3 Manfaat

Manfaat dari kegiatan penyusunan Analisis Ekonomi Makro Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023 adalah untuk menjadi salah satu dasar rekomendasi kebijakan perencanaan pembangunan di Provinsi Kalimantan Utara.

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dari kegiatan penyusunan Analisis Ekonomi Makro Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023 antara lain:

a. Menganalisis kondisi ekonomi makro Provinsi Kalimantan Utara tahun 2018-2022;
b. Menganalisis angka proyeksi indikator ekonomi makro Provinsi Kalimantan Utara tahun 2023-2024 yaitu PDRB, struktur ekonomi, laju pertumbuhan ekonomi, Indeks Williamson, IPM, kemiskinan, indeks gini, ketenagakerjaan, inflasi, investasi dan ICOR (Incremental Capital Output Ratio);
c. Merumuskan rekomendasi kebijakan yang perlu dilakukan untuk mendukung pembangunan ekonomi Provinsi Kalimantan Utara.

Analisis Ekonomi Makro Provinsi Kalimantan Utara

BAB 2
LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Ekonomi Makro

Ekonomi makro adalah cabang ilmu ekonomi yang berfokus pada analisis keseluruhan ekonomi suatu negara atau wilayah dengan mengamati fenomena-fenomena yang bersifat agregat, seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, inflasi, perdagangan internasional, dan kebijakan fiskal serta moneter. Dalam ekonomi makro, perhatian diberikan pada interaksi antara berbagai sektor ekonomi dan bagaimana kebijakan-kebijakan ekonomi makro dapat mempengaruhi perekonomian secara keseluruhan.

2.2 Indikator Ekonomi Makro

2.1.1 Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah salah satu ukuran penting dalam ekonomi makro yang mengukur total nilai seluruh barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu wilayah atau daerah dalam periode tertentu. PDRB digunakan untuk menilai kesehatan ekonomi suatu wilayah dan mengukur tingkat produksi dan aktivitas ekonomi di dalamnya.

Secara konseptual, perhitungan PDRB menggunakan tiga macam pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran dan pendekatan pendapatan.

1. Pendekatan Produksi

   PDRB menurut pendekatan produksi merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Berdasarkan PDRB ADHK tahun 2010 yang ditetapkan secara nasional, unit-unit usaha tersebut dikelompokkan menjadi tujuh belas lapangan usaha terdiri dari;

   a. Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan;
   b. Sektor Pertambangan dan Penggalian;
   c. Sektor Industri Pengolahan;
   d. Sektor Pengadaan Listrik dan Gas;

Analisis Ekonomi Makro Provinsi Kalimantan Utara

e. Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang;
f. Sektor Konstruksi;
g. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor;
h. Sektor Transportasi dan Pergudangan;
i. Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum;
j. Sektor Informasi dan Komunikasi;
k. Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi;
l. Sektor Real Estate;
m. Sektor Jasa Perusahaan;
n. Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib;
o. Sektor Jasa Pendidikan;
p. Sektor Jasa Kesehatan dan kegiatan Sosial; dan
q. Sektor Jasa Lainnya.

2. Pendekatan Pengeluaran

Menurut pendekatan pengeluaran, PDRB merupakan jumlah semua komponen permintaan akhir di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Komponen permintaan akhir (*final consumption*) tersebut meliputi:

a. Pengeluaran konsumsi rumah tangga;
b. Pengeluaran konsumsi Lembaga non-profit melayani rumah tangga/LNPRT;
c. Pengeluaran konsumsi pemerintah;
d. Pembentukan modal tetap bruto (PMTB);
e. Perubahan inventori; dan
f. Ekspor dan impor.

3. Pendekatan Pendapatan

PDRB menurut pendekatan pendapatan merupakan jumlah seluruh balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu daerah pada jangka waktu tertentu. Faktor produksi yang dimaksud tersebut adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan yang belum dipotong oleh pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Data PDRB adalah salah satu indikator makro yang dapat

Analisis Ekonomi Makro Provinsi Kalimantan Utara

menunjukkan kondisi perekonomian nasional setiap tahun. Manfaat yang dapat diperoleh dari data ini antara lain:

1) PDRB harga berlaku (nominal) menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu negara. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya;
2) PDRB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun;
3) Distribusi PDRB harga berlaku menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu negara. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu negara;
4) PDRB harga berlaku menurut pengeluaran menunjukkan produk barang dan jasa digunakan untuk tujuan konsumsi akhir, investasi dan diperdagangkan dengan pihak luar;
5) Distribusi PDRB menurut pengeluaran menunjukkan peranan kelembagaan dalam menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi;
6) PDRB pengeluaran atas dasar harga konstan bermanfaat untuk mengukur laju pertumbuhan konsumsi akhir, investasi dan perdagangan luar negeri;
7) PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk; dan
8) PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu wilayah.

2.1.2 Struktur Ekonomi

Struktur ekonomi dapat diartikan dengan kontribusi dari sektor dalam perekonomian menurut lapangan usaha. Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa

Analisis Ekonomi Makro Provinsi Kalimantan Utara

besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari setiap lapangan usaha. Struktur ekonomi yang kuat dapat dicapai dengan adanya keseimbangan dan keselarasan yang ideal antar berbagai sektor.

2.1.3 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator kesejahteraan masyarakat. Selain sebagai salah satu indikator kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi juga digunakan sebagai indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan yang telah dilaksanakan serta menentukan kebijakan arah pembangunan di masa yang akan datang. Besarnya pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Negara yang mempunyai pertumbuhan ekonomi yang tinggi menunjukkan bahwa negara tersebut mampu membawa kondisi perekonomiannya relatif lebih baik (Mankiw, 2007).

Menurut Todaro (2000), ada tiga faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap bangsa, yaitu akumulasi modal, pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi. Akumulasi modal meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik dan modal atau sumber daya manusia. Akumulasi modal (modal accumulation) terjadi apabila sebagian dari pendapatan ditabung dan diinvestasikan kembali dengan tujuan memperbesar output dan pendapatan. Pertumbuhan penduduk akan berdampak pada pertumbuhan angkatan kerja yang merupakan sumber daya penting dalam proses produksi nasional. Kemajuan teknologi menjadi salah satu faktor penting dalam peningkatan produktivitas tenaga kerja maupun modal dalam peningkatan proses produksi domestik.

Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

$$PE = \frac{PDRB_t - PDRB_{(t-1)}}{PDRB_{(t-1)}} \times 100\%$$

Analisis Ekonomi Makro Provinsi Kalimantan Utara

Keterangan:

PE = Pertumbuhan ekonomi (persen)

$PDRB_t$ = Produk Domestik Regional Bruto harga konstan tahun ke t (juta rupiah)

$PDRB_{(t-1)}$ = Produk Domestik Regional Bruto harga konstan tahun ke (t-1) (juta rupiah)

2.1.4 Indeks Williamson

Dewasa ini, pembangunan di suatu wilayah acapkali tidak merata yang menyebabkan ketimpangan pembangunan antarwilayah. Ketimpangan pembangunan antarwilayah dapat terjadi akibat perbedaan sumber daya alam, tingkat mobilitas, aktivitas perekonomian dan investasi serta perbedaan kondisi geografis dan demografi masing-masing wilayah. Ketimpangan pembangunan antarwilayah dapat dilihat dengan menghitung Indeks Williamson.

Indeks Wiliamson adalah teori disparitas yang dikemukakan oleh Jeffery G. Williamson. Indeks Williamson merupakan satu instrumen dalam pengukuran pembangunan wilayah di suatu daerah dengan membandingkannya dengan wilayah yang lebih tinggi. Dengan kata lain, Indeks Williamson secara garis besar mengukur seberapa kesenjangan yang ada pada suatu pembangunan pada suatu wilayah.

Nilai Indeks Williamson diperoleh kriteria penilaian Indeks Williamson menurut Waluyaningsih dan Setiawan (2020) terbagi menjadi 4 (empat), yaitu seperti yang ditampilkan pada gambar 2.1.

Indeks > 1	= Ketimpangan sangat tinggi
Indeks 0,7 – 1	= Ketimpangan tinggi
Indeks 0,4 – 0,69	= Ketimpangan sedang
Indeks < 0,39	= Ketimpangan rendah

Gambar 2.1 Kriteria Penilaian Indeks Williamson

2.1.5 Indeks Pembangunan Manusia

UNDP dalam Human Development Report yang pertama (1990) menyatakan bahwa sasaran-sasaran pokok pembangunan adalah untuk menciptakan suatu lingkungan yang memungkinkan rakyat menikmati kehidupan

Analisis Ekonomi Makro Provinsi Kalimantan Utara

yang panjang, sehat dan kreatif. UNDP sangat menekankan arti pentingnya pembangunan yang menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan, dan bukan sebagai alat bagi pembangunan. Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk. Pilihan yang terpenting adalah untuk berumur panjang dan sehat, untuk berilmu pengetahuan dan untuk mempunyai akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak. Semakin tinggi pendidikan semakin banyak peluang-peluang yang bisa diraih. Manusia bisa menentukan pilihannya dalam sistem pasar yang berfungsi dengan baik. Pembangunan manusia juga merupakan perwujudan tujuan jangka panjang dari suatu masyarakat dan meletakkan pembangunan di sekeliling manusia, bukan manusia di sekeliling pembangunan. Sebagai salah satu upaya untuk menganalisis status pembangunan baik antar negara maupun antar daerah, maka UNDP menyusun Human Development Index (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang diterbitkan dalam publikasi berjudul Human Development Reports.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan kehidupan yang layak. Dimensi umur panjang dan hidup sehat direpresentasikan dengan indikator Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH), dimensi standar hidup layak direpresentasikan dengan indikator Pengeluaran per Kapita per tahun yang disesuaikan dan dimensi pengetahuan direpresentasikan dengan indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan indikator Rata-Rata Lama Sekolah (RLS). IPM sebagai indikator keberhasilan pembangunan manusia dapat menjadi isyarat seberapa besarnya pembangunan yang telah dijalankan mampu memberi peluang penduduk untuk hidup secara layak melalui hidup sehat dan panjang untuk memiliki pendidikan yang lebih tinggi, keterampilan yang lebih baik serta mempunyai pendapatan yang diperlukan untuk hidup layak. Indeks ini dikenalkan oleh pemenang Nobel India, Amartya Sen dan seorang ekonom Pakistan Mahbub ul Haq pada 1990. Sejak itu indeks ini dipakai oleh program pembangunan PBB pada laporan IPM tahunannya.

AHH didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan

Analisis Ekonomi Makro Provinsi Kalimantan Utara

suatu masyarakat. AHH dihitung dari hasil sensus dan survei kependudukan. Rata-rata Lama Sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas.

RLS didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas.

HLS didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Pengeluaran per kapita yang disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*Purchasing Power Parity*). Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas, dihitung dari level provinsi hingga level kab/kota. Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat konstan/riil dengan tahun dasar 2012=100. Perhitungan paritas daya beli pada metode baru menggunakan 96 komoditas dimana 66 komoditas merupakan makanan dan sisanya merupakan komoditas non makanan.

Dalam penghitungan IPM, setiap komponen IPM harus dihitung indeksnya. Formula yang digunakan dalam penghitungan indeks komponen IPM adalah sebagai berikut:

Indeks Kesehatan $$I_{Kesehatan} = \frac{UHH - UHH_{min}}{UHH_{maks} - UHH_{min}}$$

Indeks Pendidikan $$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$$

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLSS_{min}}$$

$$I_{Pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$$

Analisis Ekonomi Makro Provinsi Kalimantan Utara

Indeks Pengeluaran

$$I_{pengeluaran} = \frac{\ln(pengeluaran) - \ln(pengeluaran_{min})}{\ln(pengeluaran_{maks}) - \ln(pengeluaran_{min})}$$

Selanjutnya nilai IPM dapat dihitung sebagai berikut.

$$IPM = \sqrt[3]{I_{Kesehatan} \times I_{Pendidikan} \times I_{Pengeluaran}} \text{ x } 100$$

2.1.6 Kemiskinan

Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan kemiskinan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Sedangkan menurut Kuncoro (2004), kemiskinan didefinisikan sebagai perkiraan tingkat pendapatan, kebutuhan pokok, dan kebutuhan dasar minimum yang memungkinkan seseorang untuk dapat hidup secara layak. Bila pendapatan tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum, maka orang tersebut dapat dikatakan miskin. Definisi kemiskinan dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, antara lain:

1) Kemiskinan menurut standar hidup layak. Kelompok ini berpendapat kemiskinan terjadi ketika tidak terpenuhinya kebutuhan 10 pokok atau kebutuhan dasar. Artinya, seseorang atau suatu rumah tangga termasuk dalam kategori miskin bila keluarga tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok sesuai dengan standar hidup layak. Kemiskinan seperti ini disebut dengan kemiskinan absolut;
2) Kemiskinan menurut tingkat pendapatan. Pandangan ini berpendapat bahwa kemiskinan terjadi disebabkan oleh kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup layak.

Kedua sudut pandang tersebut memiliki kesamaan, yaitu ketidakmampuan memenuhi kebutuhan pokok atau hidup layak, disebut dengan kemiskinan menurut *basic needs approach* (Maipita, 2014).

Analisis Ekonomi Makro Provinsi Kalimantan Utara

Isdjoyo dalam Maspita (2014) membedakan penyebab kemiskinan di desa dan di kota. Kemiskinan di desa terutama disebabkan oleh faktor-faktor antara lain:

1) Ketidakberdayaan, kondisi ini muncul karena kurangnya lapangan pekerjaan, rendahnya harga produk yang dihasilkan, dan tingginya biaya pendidikan;
2) Keterkucilan, rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya keahlian, sulitnya transportasi, serta ketiadaan akses terhadap kredit menyebabkan mereka terkucil dan menjadi miskin;
3) Kemiskinan materi, kondisi ini diakibatkan kurangnya modal, dan minimnya lahan pertanian yang dimiliki menyebabkan penghasilan relatif rendah;
4) Kerentanan, sulitnya mendapatkan pekerjaan, pekerjaan musiman, dan bencana alam, menyebabkan mereka menjadi rentan dan miskin;
5) Sikap, sikap yang menerima apa adanya dan kurang termotivasi untuk bekerja keras membuat mereka menjadi miskin.

Kemiskinan di kota disebabkan oleh faktor-faktor yang sama seperti di desa, yang berbeda adalah penyebab dari faktor ketidakberdayaan di kota cenderung disebabkan kurangnya lapangan kerja dan biaya hidup yang tinggi. Menurut Spicker (2002), penyebab kemiskinan dapat dibagi dalam empat mazhab, yaitu:

1) *Individual explanation*, diakibatkan oleh karakteristik orang miskin itu sendiri: malas, pilihan yang salah, gagal dalam bekerja, cacat bawaan, belum siap memiliki anak dan sebagainya;
2) *Familial explanation*, akibat faktor keturunan, di mana antar generasi terjadi ketidakberuntungan yang berulang, terutama akibat pendidikan;
3) *Subcultural explanation*, akibat karakteristik perilaku suatu lingkungan yang berakibat pada moral dari masyarakat;
4) *Structural Explanations*, menganggap kemiskinan sebagai produk masyarakat yang menciptakan ketidakseimbangan dengan pembedaan status dan hak.

Analisis Ekonomi Makro Provinsi Kalimantan Utara

Dalam mengukur kemiskinan, BPS menggunakan dua metode pendekatan, yaitu *Head Count Index* (HCI-P_0) dan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dalam konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Sedangkan *Head Count Index* menghitung persentase yang berada di bawah garis kemiskinan. *Head Count Index* termasuk dalam perhitungan kemiskinan yang cukup sering digunakan di Indonesia.

Konsep garis kemiskinan menurut BPS dikategorikan menjadi tiga, yaitu:

1) Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) untuk mengetahui jumlah penduduk miskin;
2) Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari;
3) Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya (BPS, 2020).

Perhitungan persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan dapat dituliskan sebagai berikut:

$$P_0 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{q}\left[\frac{z - y_i}{z}\right]^{\alpha}$$

Keterangan:

α = 0

z = Garis kemiskinan

yi = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan (i=1, 2, 3, ..., q), yi < z

q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan

n = Jumlah penduduk

Analisis Ekonomi Makro Provinsi Kalimantan Utara

2.1.7 Indeks Gini

Untuk mengukur derajat ketidakmerataan distribusi penduduk, salah satu indikator yang sering dipakai adalah indeks gini. Indeks Gini atau Koefisien Gini secara luas digunakan untuk mengukur ketimpangan dan distribusi pendapatan. Cara untuk menganalisis distribusi pendapatan perorangan adalah menggunakan kurva Lorenz. Kurva Lorenz menunjukkan hubungan kuantitatif antara persentase penduduk dan persentase pendapatan yang mereka terima. Kurva ini diambil dari nama Conrad Lorenz, seorang ahli statistika dari Amerika Serikat. Tahun 1905, ia menggambarkan hubungan antara kelompok-kelompok penduduk dan pangsa (*share*) pendapatan mereka.

Semakin jauh kurva Lorenz tersebut dari garis diagonal (kemerataan sempurna), maka semakin tinggi pula derajat ketidakmerataan ditunjukkan. Keadaaan yang paling ekstrim dari ketidakmerataan sempurna, misalnya keadaan di mana seluruh pendapatan hanya diterima oleh satu orang, akan ditunjukkan oleh berhimpitnya kurva Lorenz tersebut dengan sumbu horizontal bagian bawah dan sumbu vertikal sebelah kanan. Perbandingan antara luas daerah kurva Lorenz dengan luas daerah di bawah garis diagonal dapat diperoleh nilai indeks gini. Secara matematis, untuk menghitung indeks gini dapat menggunakan persamaan berikut (Arsyad, 2010: 290).

$$\boldsymbol{Indeks\ Gini} = \mathbf{1} - \sum_{\boldsymbol{i=1}}^{\boldsymbol{k}} \boldsymbol{f_i}(\boldsymbol{Y_{i+1}} + \boldsymbol{Y_i})$$

Keterangan:

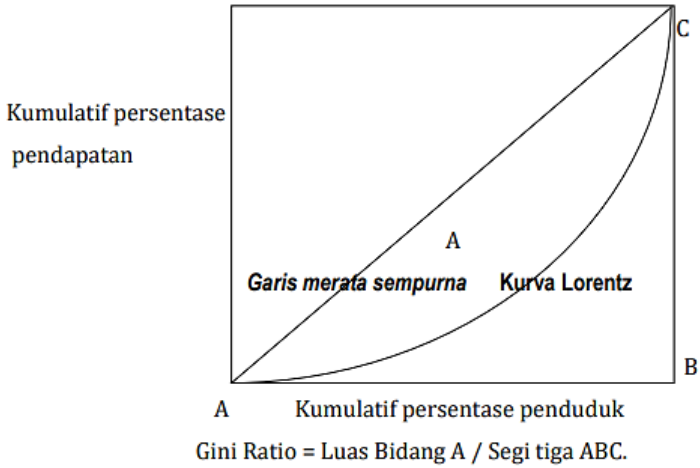
f_i = Proporsi jumlah rumah tangga kumulatif kelas i

Y_i = Proporsi jumlah pendapatan rumah tangga kumulatif dalam kelas i

Nilai indeks gini berkisar antara 0 hingga 1. Semakin mendekati 1 maka dikatakan tingkat ketimpangan pendapatan penduduk makin melebar atau mendekati ketimpangan sempurna. Sebaliknya, semakin mendekati 0 distribusi pendapatan penduduk semakin merata atau mendekati pemerataan sempurna. Menurut Harry T. Oshima, nilai indeks gini dibagi menjadi tiga tingkatan. Jika nilai indeks gini kurang dari 0,3 masuk dalam kategori ketimpangan “rendah”; nilainya antara 0,3 hingga 0,5 masuk dalam kategori ketimpangan “sedang”; dan jika nilainya lebih besar dari 0,5 masuk dalam kategori ketimpangan “tinggi”. Dengan

Analisis Ekonomi Makro Provinsi Kalimantan Utara

kata lain, indeks gini diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk.



Gambar 2.2 Kurva Lorenz

Studi empiris di negara sedang berkembang, terutama di negara-negara yang mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi yang pesat, ditunjukkan adanya kecenderungan korelasi positif antara laju pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesenjangan ekonomi. Dari fakta tersebut, muncul pertanyaan: mengapa terjadi *trade-off* antara pertumbuhan dan kesenjangan ekonomi dan untuk berapa lama? Kerangka pemikiran ini yang melandasi Hipotesis Kuznets, yaitu dalam jangka pendek ada korelasi positif antara pertumbuhan pendapatan perkapita dengan kesenjangan pendapatan. Namun dalam jangka panjang hubungan keduanya menjadi korelasi yang negatif. Artinya, dalam jangka pendek meningkatnya pendapatan akan diikuti dengan meningkatnya kesenjangan pendapatan, namun dalam jangka panjang peningkatan pendapatan akan diikuti dengan penurunan kesenjangan pendapatan. Dalam teori ekonomi hal ini dikenal dengan nama "Kurva U terbalik dari Hipotesis Kuznets".

Hipotesis Kuznets ini mulai dipertanyakan. Beberapa studi yang mengambil data *time series* membuktikan bahwa dalam beberapa negara yang masih bertumpu pada sektor pertanian (*rural economy*) menunjukan hubungan negatif. Ini berarti bertolak belakang dari hipotesis Kuznets. Pemahaman atas variabel-variabel tersebut akan membuktikan bahwa negara pertanian tidak identik dengan kemiskinan atau mungkin lebih tepatnya adalah kesejahteraan pun bisa meningkat di negara-negara yang berbasis pertanian.

Analisis Ekonomi Makro Provinsi Kalimantan Utara

2.1.8 Ketenagakerjaan

Konsep dan definisi yang digunakan dalam pengumpulan data ketenagakerjaan oleh Badan Pusat Statistik mengacu pada *The Labour Force Concept* yang disarankan oleh *International Labour Organization* (ILO). Konsep ini membagi penduduk menjadi dua kelompok, yaitu penduduk usia kerja dan penduduk bukan usia kerja. Selanjutnya, penduduk usia kerja dibedakan pula menjadi dua kelompok berdasarkan kegiatan utama yang sedang dilakukannya. Kelompok tersebut adalah Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja. Lebih lanjut, konsep ketenagakerjaan dapat dirincikan dalam diagram ketenagakerjaan yang disajikan pada gambar 2.3.



Gambar 2.3 Diagram Ketenagakerjaan
Sumber: Dimodifikasi oleh BPS

Konsep dan definisi masing-masing istilah ketenagakerjaan tersebut yaitu:

1) Penduduk usia kerja adalah penduduk berumur lebih dari 15 tahun;
2) Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan, akan tetapi sementara tidak bekerja dan pengangguran;
3) Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya;

Analisis Ekonomi Makro Provinsi Kalimantan Utara

4) Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pula kegiatan tidak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi;
5) Pengangguran terbuka adalah angkatan kerja yang tidak bekerja/tidak mempunyai pekerjaan yang mencakup angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan dan yang punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja;
6) Punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja (*have a job in future start*) adalah keadaan dari seseorang yang mempunyai pekerjaan tetapi selama seminggu yang lalu tidak bekerja karena berbagai sebab, seperti sakit, cuti, menunggu panenan, mogok dan sebagainya, termasuk mereka yang sudah diterima bekerja tetapi selama seminggu yang lalu belum mulai bekerja;
7) Mencari pekerjaan (*looking for work*) adalah kegiatan seseorang yang tidak bekerja dan pada saat survei orang tersebut sedang mencari pekerjaan. Usaha mencari pekerjaan ini tidak terbatas pada seminggu sebelum pencacahan saja, tetapi bisa dilakukan beberapa waktu yang lalu asalkan seminggu yang lalu masih menunggu jawaban. Apabila sedang bekerja/dibebastugaskan baik akan dipanggil kembali ataupun tidak, dan berusaha untuk mendapatkan pekerjaan, tidak dapat disebut sebagai pengangguran;
8) Mempersiapkan usaha (*establishing a new bussiness/firm*) adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dalam rangka mempersiapkan suatu usaha yang ”baru” yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan/keuntungan atas resiko sendiri, baik dengan atau tanpa mempekerjakan buruh/karyawan/pegawai dibayar maupun tidak dibayar. Mempersiapkan suatu usaha yang dimaksud adalah apabila ”tindakan nyata”, seperti mengumpulkan modal, perlengkapan/alat, mencari lokasi/tempat, mengurus izin usaha dan sebagainya telah/sedang dilakukan;

Analisis Ekonomi Makro Provinsi Kalimantan Utara

9) Setengah penganggur adalah orang yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu). Setengah penganggur dibagi menjadi dua, yaitu:
   - Setengah penganggur terpaksa adalah orang yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu) dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan;
   - Setengah penganggur sukarela adalah orang yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu), tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain (sebagian pihak menyebutnya sebagai pekerja paruh waktu/ part time worker).

Semakin besar jumlah angkatan kerja, maka semakin besar juga potensi untuk meningkatkan aktivitas perekonomian. Namun, hal ini hanya mungkin terjadi apabila seluruh angkatan kerja dapat diserap oleh kesempatan kerja. Kesempatan kerja merupakan suatu keadaan yang menggambarkan ketersediaan lapangan kerja di masyarakat. Jika terjadi gap antara banyaknya angkatan kerja dan kesempatan kerja maka angka pengangguran akan meningkat. Semakin tingginya angka penganguran maka beban yang akan ditanggung oleh suatu daerah menjadi semakin besar. Beberapa dampak pengangguran dalam suatu perekonomian daerah di antaranya adalah sebagai berikut:

1) Daya beli menurun, pengangguran tidak meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sehingga daya beli masyarakat berkurang. Daya beli yang menurun ini menyebabkan permintaan barang di pasar berkurang dan selanjutnya menyebabkan investasi dan pertumbuhan ekonomi menurun;
2) Mengurangi pendapatan negara, jumlah pengangguran yang tinggi dapat mengurangi pendapatan pemerintah dari pajak. Ekonomi akan menurun jika masyarakat tidak memiliki pendapatan dan pembayaran pajak;
3) Tingkat kesejahteraan masyarakat menurun karena dengan jumlah pengangguran yang besar akan menurunkan besarnya pendapatan per kapita;

Analisis Ekonomi Makro Provinsi Kalimantan Utara

4) Biaya sosial yang semakin tinggi, sebagai contoh biaya medis, keamanan dan proses peradilan. Tingginya jumlah pengangguran dapat berdampak pada tindak kejahatan.

2.1.9 Inflasi

Inflasi merupakan kenaikan harga barang-barang akibat cepatnya peredaran uang di masyarakat yang menyebabkan kemerosotan nilai uang di suatu wilayah, atau singkatnya inflasi adalah kondisi kenaikan harga barang atau jasa di suatu wilayah secara terus-menerus. Dengan terjadinya inflasi di suatu wilayah menjadikan kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli yang dampaknya dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan.

Terjadinya inflasi dapat disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu:

1) Inflasi karena Tarikan Permintaan (Demand Pull Inflation)
   Terjadi akibat adanya permintaan total yang berlebihan dimana biasanya dipicu oleh membanjirnya likuiditas di pasar sehingga terjadi permintaan yang tinggi dan memicu perubahan pada tingkat harga. Bertambahnya volume alat tukar atau likuiditas yang terkait dengan permintaan terhadap barang dan jasa mengakibatkan bertambahnya permintaan terhadap faktor faktor produksi tersebut. Meningkatnya permintaan terhadap faktor produksi itu kemudian menyebabkan harga faktor produksi meningkat;
2) Inflasi karena Desakan Biaya (Cost Push Inflation)
   Inflasi karena desakan biaya ini terjadi akibat adanya kelangkaan produksi dan/atau termasuk juga kelangkaan distribusi, walaupun permintaan secara umum tidak ada perubahan yang meningkat secara signifikan. Ketidaklancaran distribusi atau dengan berkurangnya produksi yang tersedia dari rata-rata permintaan normal dapat mengakibatkan kenaikan harga sesuai dengan berlakunya hukum permintaan penawaran;
3) Inflasi Campuran (Mixed Inflation)
   Inflasi ini terjadi karena adanya kenaikan penawaran dan permintaan yang dipicu oleh ketidakseimbangan antara keduanya. Sebagai contoh, ketika permintaan barang/jasa X meningkat dan ini menyebabkan persediaan barang/jasa X menurun sedangkan barang pengganti atau substitusinya

Analisis Ekonomi Makro Provinsi Kalimantan Utara

terbatas atau bahkan tidak ada, maka ketidakseimbangan ini akan mengakibatkan inflasi;

4) Inflasi Ekspektasi (Expected Inflation)

   Inflasi tidak hanya disebabkan oleh faktor permintaan dan penawaran namun juga dapat disebabkan oleh adanya ekspektasi pelaku ekonomi atau sering disebut sebagai inflasi ekspektasi. Inflasi ekspektasi adalah inflasi yang terjadi akibat adanya perilaku masyarakat secara umum yang bersifat adaptif atau forward looking.

Berdasarkan tingkatannya, inflasi digolongkan ke dalam empat jenis yaitu inflasi ringan (di bawah 10 persen dalam setahun), inflasi sedang (antara 10 sampai 30 persen dalam setahun), inflasi berat (antara 30 sampai dengan 100 persen dalam setahun), dan hiperinflasi (inflasi tak terkendali) dimana inflasi yang terjadi lebih dari 100 persen dalam setahun. Inflasi dapat diukur dengan menghitung perubahan tingkat perubahan relatif dari indeks harga (Mankiw, 2007:33-34). Indeks harga tersebut di antaranya adalah Indeks Harga Konsumen (IHK) atau *Consumer Price Index* (CPI), indeks biaya hidup atau *Cost of Living Index* (COLI), Indeks Harga Produsen (IHP), indeks harga komoditas (tertentu), indeks harga barang-barang modal, dan deflator Produk Domestik Bruto (PDB). Meskipun ada beberapa indeks yang dapat digunakan, namun IHK dan deflator PDB adalah yang sering digunakan dalam perhitungan.

Beberapa dampak yang ditimbulkan akibat terjadinya inflasi kepada individu dan masyarakat, yaitu:

1) Inflasi menurunkan pendapatan riil masyarakat yang berpenghasilan tetap. Pada umumnya kenaikan upah tidak akan bergerak lebih cepat dibandingkan kenaikan harga sehingga inflasi akan menurunkan upah riil individu yang berpenghasilan tetap;
2) Inflasi akan mengurangi nilai kekayaan yang berbentuk uang. Sebagian kekayaan masyarakat disimpan dalam bentuk uang. Tabungan masyarakat di bank, tabungan tunai dan tabungan pada institusi-institusi keuangan lainnya merupakan tabungan dalam bentuk uang. Ketika inflasi terjadi maka nilai riil dari setiap uang yang ditabung tersebut akan mengalami penurunan;

Analisis Ekonomi Makro Provinsi Kalimantan Utara

3) Inflasi memperburuk pembagian kekayaan. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa penerima penghasilan tetap akan mengalami penurunan nilai riil pendapatan dan pemilik kekayaan yang bersifat uang akan mengalami penurunan nilai riil kekayaannya. Tetapi masyarakat yang memiliki harta-harta tetap seperti tanah, bangunan dan rumah dapat mempertahankan atau bahkan menambah nilai riil kekayaannya. Artinya, inflasi menyebabkan pembagian pendapatan diantara golongan masyarakat berpenghasilan tetap dengan pemilik harta tetap akan menjadi semakin tidak merata.

2.1.10 Investasi

Dalam konteks neraca nasional, investasi merujuk pada salah satu komponen penting dalam perhitungan ekonomi suatu negara. Investasi dalam neraca nasional mencakup total belanja yang dialokasikan oleh sektor swasta dan pemerintah untuk memperoleh atau meningkatkan aset produktif dalam ekonomi. Aset-aset produktif ini dapat berupa fasilitas produksi, infrastruktur, peralatan, dan inventaris yang berkontribusi terhadap produksi barang dan jasa di masa depan.

Investasi dalam konsep neraca nasional juga disebut dengan akumulasi fisik, sehingga investasi didefinisikan sebagai “pengadaan, pembuatan, pembelian barang modal baru dari dalam negeri dan barang modal baru maupun bekas dari luar negeri, dikurangi penjualan neto barang modal bekas”.

Investasi memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Investasi yang dilakukan oleh sektor swasta dan pemerintah dapat merangsang aktivitas ekonomi dengan menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan produksi, dan mendorong inovasi. Investasi juga dapat membantu meningkatkan daya saing suatu negara dalam pasar global. Namun, investasi juga dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi dan politik. Tingkat suku bunga, stabilitas politik, perkiraan pertumbuhan ekonomi, dan regulasi pemerintah adalah beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keputusan untuk berinvestasi. Dengan demikian, investasi dalam konteks neraca nasional mencerminkan upaya untuk membangun dan memperkuat fondasi ekonomi

Analisis Ekonomi Makro Provinsi Kalimantan Utara

suatu negara, dengan tujuan mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan kesejahteraan masyarakat.

Investasi dapat dibagi menjadi 3 (tiga) klasifikasi sebagai berikut:

A. Investasi Menurut Jenis Barang Modal

Barang modal adalah barang-barang yang mempunyai umur pemakaian 1 (satu) tahun atau lebih, dan yang dimaksud dengan pemakaian adalah penggunaan barang-barang modal tersebut sebagai alat yang tetap dalam menghasilkan output suatu lapangan usaha. Secara lebih rinci, barang modal menurut jenisnya terdiri atas:

1) Barang modal dalam bentuk konstruksi, baik berupa bangunan tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal, konstruksi lainnya seperti jalan raya, jembatan, instalasi listrik, jaringan komunikasi, bendungan irigasi, pelabuhan, dan sebagainya;
2) Barang modal dalam bentuk mesin dan peralatan baik untuk keperluan pabrik, kantor maupun untuk usaha rumah tangga;
3) Barang modal berupa alat transportasi (kendaraan) termasuk barang modal dari alat-alat transportasi adalah pengadaan alat-alat atau sarana angkutan seperti kapal laut, mobil angkutan penumpang bermotor, mobil angkutan barang bermotor, mobil angkutan penumpang tidak bermotor, mobil angkutan barang tidak bermotor, perahu penyeberangan dan sejenisnya;
4) Biaya yang dikeluarkan untuk perubahan dan perbaikan besar barang modal seperti disebutkan di atas yang dapat meningkatkan produktivitas atau memperpanjang umur pemakaian barang modal tersebut;
5) Pengeluaran untuk pengembangan dan pembukaan lahan baru, pematangan tanah (lahan), perluasan hutan, penghutanan kembali serta penanaman dan peremajaan pohon tanaman hias;
6) Pembelian ternak produktif untuk keperluan pembiakan, pemerahan susu, pengangkutan, dan sebagainya tetapi tidak termasuk pembelian ternak untuk dipotong atau dikomsumsi.

B. Investasi Menurut Lapangan Usaha

Investasi menurut lapangan usaha adalah investasi barang modal yang dimiliki atau dikuasai oleh lapangan usaha ekonomi produksi (produsen) yang

Analisis Ekonomi Makro Provinsi Kalimantan Utara

digunakan dalam proses produksinya dengan tujuan memperoleh pengembalian atau keuntungan di masa depan. Lapangan usaha ekonomi secara garis besar terdiri dari lapangan usaha primer, sekunder dan tersier. Secara rinci lapangan usaha terdiri atas:

1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan;
2) Pertambangan dan Penggalian;
3) Industri Pengolahan;
4) Pengadaan Listrik dan Gas;
5) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang;
6) Konstruksi;
7) Perdagangan Besar dan Eceran;
8) Reparasi Mobil dan Sepeda Motor;
9) Transportasi dan Pergudangan;
10) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum;
11) Informasi dan Komunikasi;
12) Jasa Keuangan dan Asuransi;
13) Real Estate;
14) Jasa Perusahaan;
15) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib;
16) Jasa Pendidikan;
17) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial;
18) Jasa lainnya.

Adapun cakupan investasi pada setiap Lapangan usaha ekonomi atau lapangan usaha adalah sebagai berikut:

1) Investasi di lapangan usaha **Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan** mencakup semua bangunan bukan tempat tinggal yang digunakan oleh para petani untuk menyimpan hasil produksi, bangunan dan saluran air untuk irigasi, peningkatan mutu tanah, penanaman dan perluasan perkebunan, mesin-mesin dan alat-alat perlengkapan untuk pertanian serta perbaikan besar-besaran atas mesin tersebut, dan pembelian ternak perah dan ternak yang dipelihara untuk diambil susu atau telurnya serta alat-alat penangkapan ikan dan tempat pemeliharaannya;

Analisis Ekonomi Makro Provinsi Kalimantan Utara

2) Investasi di lapangan usaha **Pertambangan** terdiri dari perluasan areal pertambangan dan bangunannya, mesin-mesin dan alat-alat perlengkapan pertambangan serta perbaikannya, kendaraan/alat pengangkut yang dipakai dalam usaha pertambangan dan barang-barang modal lainnya yang digunakan sebagai alat dalam berproduksi di lapangan usaha pertambangan;
3) Investasi di lapangan usaha **Industri Pengolahan** adalah semua barang-barang modal seperti gedung-gedung, kendaraan, mesin-mesin dan alat-alat perlengkapan yang dipakai dalam usaha industri pengolahan termasuk perbaikannya;
4) Investasi pada lapangan usaha **Listrik, Gas dan Air Bersih** mencakup pembuatan proyek pembangkit tenaga listrik, transmisi dan gardu distribusi beserta kantor-kantornya, dan pembelian/penambahan prasarana produksi di lapangan usaha gas dan air bersih;
5) Investasi di lapangan usaha **Bangunan/Konstruksi** adalah semua pembelian/ penambahan prasarana produksi yang diperlukan dalam kegiatan konstruksi. Termasuk di sini adalah kantor beserta peralatannya, alat-alat besar dan kendaraan yang digunakan dalam menunjang kegiatan lapangan usaha konstruksi;
6) Investasi di lapangan usaha **Perdagangan, Hotel dan Restoran** adalah semua barang modal yang dimiliki, dikuasai dan digunakan dalam kegiatan usaha tersebut yang meliputi bangunan toko, bangunan hotel, restoran, beserta seluruh fasilitas pendukungnya seperi kolam renang, lapangan olah raga, lapangan parkir dan lainnya. Termasuk pula berbagai peralatan produksi yang beragam, moda transportasi, berbagai jenis mesin, serta bangunan asrama yang disediakan perusahaan untuk tempat tinggal pegawainya;
7) Investasi di lapangan usaha **Transportasi dan Komunikasi**, barang modalnya antara lain adalah penguasaan dan pengoperasian semua jenis kendaraan operasional pengangkutan antara lain bus, truk, taksi, mikrolet, sado/delman, bajaj, becak, dan lain-lain; moda angkutan di sungai, moda angkutan laut dan moda angkutan udara, kereta api, termasuk juga bangunan kantor-kantor PT Kereta Api serta pembuatan jalan-jalan (rel)

Analisis Ekonomi Makro Provinsi Kalimantan Utara

kereta api, dan stasiun-stasiun berikut dengan rambu-rambunya, serta bangunan bukan tempat tinggal dan kendaraan-kendaraan dinas maupun operasional yang digunakan untuk menunjang usaha angkutan seperti yang terdapat pada kegiatan pelabuhan (udara, laut dan sungai), ekspedisi, penggudangan, jalan tol, keagenan, wartel, serta kegiatan sejenis lainnya;

8) Investasi di lapangan usaha **Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Real Estate dan Jasa Perusahaan** mencakup bangunan bukan tempat tinggal yang dimiliki dan digunakan untuk operasi perbankan, kendaraan yang dimiliki dan dipakai untuk menunjang kegiatan perbankan. Termasuk juga kantor-kantor perwakilan perbankan beserta peralatan yang digunakan;
9) Investasi pada lapangan usaha **Pemerintahan** hanya mencakup barang-barang modal yang dibeli, dibuat atau diadakan oleh pemerintah untuk menunjang terlaksananya kegiatan administrasi pemerintahan saja. Barang-barang modal yang dimaksud adalah seperti gedung-gedung/kantor-kantor pemerintah, pembelian mobil pemadam kebakaran beserta peralatannya dan sebagainya, yang semuanya digunakan sebagai alat dari instansi-instansi pemerintah dalam memberikan jasa/pelayanan kepada masyarakat. Termasuk di sini pembuatan jalan-jalan baik oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah. Pembelian barang-barang modal oleh pemerintah untuk perusahaan-perusahaan (termasuk perusahaan negara) dalam rangka bantuan pemerintah (*capital transfer*) tidak termasuk dalam pembentukan modal lapangan usaha pemerintah melainkan merupakan pembentukan modal oleh perusahaan yang menerima sumbangan tersebut;
10) Investasi pada lapangan usaha **Jasa-jasa** berupa bangunan rumah sakit, bangunan sekolah, gedung pertunjukan, gedung bioskop, salon-salon atau rumah-rumah perawatan kecantikan, taman-taman hiburan, maupun bangunan bukan tempat tinggal dan tempat tinggal lainnya, mobil sirkus, studio rekaman, peralatan kantor, kendaraan operasional dan kendaraan dinas lainnya.

Analisis Ekonomi Makro Provinsi Kalimantan Utara

C. Investasi Menurut Institusi

Besarnya investasi pada masing-masing tahun dapat dirinci menurut institusi yang melakukan investasi atau dengan perkataan lain penggolongan ini menjelaskan tentang barang modal yang dimiliki atau dikuasai oleh pelaku-pelaku ekonomi *(*institusi*)* untuk digunakan dalam proses produksinya baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam hal ini rincian investasi menurut institusi hanya dapat dilakukan berdasarkan atas dasar harga berlaku karena deflator menurut institusi untuk menghasilkan penghitungan atas dasar harga konstan tidak tersedia. Penghitungan investasi berdasarkan harga berlaku dan harga konstan tersebut biasa digunakan untuk mengukur perubahan nilai investasi dari waktu ke waktu dengan memperhitungkan inflasi atau deflasi. Adapun Institusi disini meliputi:

1) **Pemerintah**, dalam hal ini adalah pemerintah yang menyelenggarakan *general administration*, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hal ini dilakukan agar sesuai dengan konsep pemerintah dalam PDRB yang mencakup pemerintah dalam tugas *general administration* saja. Pengeluaran investasi oleh pemerintah, misalnya untuk pembangunan gedung kantor, pembelian mesin-mesin, komputer untuk penyelenggaraan pemerintah. Termasuk juga bila pemerintah mengadakan barang modal untuk kepentingan masyarakat yang bersifat infrastruktur, seperti pembangunan jalan, pembangunan irigasi, dan sebagainya;
2) **Badan Usaha Milik Nasional (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD***)*, merupakan badan usaha yang dibangun oleh pemerintah baik ditingkat nasional (BUMN) maupun ditingkat daerah (BUMD) yang sebagian besar sahamnya dikuasai oleh pemerintah. Barang modal/investasi yang dikuasai di antaranya armada bus dan truk, jaringan dan distribusi air minum, bangunan kantor, bangunan pabrik, dan sebagainya. Karena keterbatasan data, maka cakupan BUMN dan BUMD di sini adalah badan usaha yang berada di wilayah dan termasuk badan usaha yang bersifat multi region, seperti misalnya industri telekomunikasi dan listrik;

Analisis Ekonomi Makro Provinsi Kalimantan Utara

3) **Badan Usaha Swasta Rumah tangga**, merupakan usaha yang dibangun oleh masyarakat umum dan atau korporasi baik yang kegiatannya bersifat formal, maupun non-formal. Usaha ini menguasai barang modal seperti bangunan kantor, pabrik, gudang-gudang penyimpanan, peralatan kantor, mesin-mesin, perlengkapan kantor, kendaraan (sarana transportasi) dan sebagainya.

a. Investasi Menurut Harga Berlaku

Pada tahap awal untuk mengukur investasi adalah dengan menggunakan data-data hasil survei dan direkonsiliasi dengan data Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan perubahan inventori atas dasar harga berlaku (konsep ekonomi makro). Tahap selanjutnya adalah melakukan estimasi besaran investasi menurut barang modal dan menurut lapangan usaha ekonomi, serta menurut institusi yang melakukan investasi.

Penilaian investasi yang didasarkan harga pada transaksi yang sedang berlangsung/berjalan (*current value*), yang dilakukan oleh berbagai pelaku ekonomi produsen, di wilayah domestik investasi atas dasar harga berlaku ini menjelaskan tentang nilai total pembentukan modal yang diperoleh dari hasil perkalian antara volume dengan harga dari masing-masing jenis barang modal. Proses penghitungannya adalah:

1) Investasi berupa bangunan diperoleh dengan cara mengalikan rasio tertentu terhadap total output bangunan yang dihasilkan oleh lapangan usaha konstruksi domestik, pada masing-masing tahun. *Output* bangunan tersebut merupakan penyediaan yang berasal dari produksi domestik. Diasumsikan tidak ada output bangunan yang berasal dari impor.
2) Investasi berupa mesin-mesin, alat angkutan dan barang modal lainnya yang berasal dari produksi domestik diperoleh dengan cara meng-inflate dasar harga konstan dengan Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) masing-masing jenis barang modal.

Analisis Ekonomi Makro Provinsi Kalimantan Utara

b. Investasi Menurut Harga Konstan

Merupakan penilaian investasi yang didasarkan pada harga satu tahun dasar tertentu (2010). Diasumsikan tidak tejadi perubahan harga pada tahun-tahun penghitungan, sehingga perubahan investasi yang tejadi hanya merefleksikan perubahan volume saja. Nilai investasi atas dasar harga konstan sama dengan volume investasi pada tahun berjalan dikalikan dengan harga pada tahun dasar tertentu. Proses penghitungannya adalah:

1) Investasi berupa bangunan dihitung dengan cara mengalikan output domestik bangunan atas dasar harga konstan dengan menggunakan rasio tertentu, pada masing-masing tahun. Output bangunan dihasilkan oleh Lapangan usaha konstruksi.
2) Investasi berupa mesin-mesin, alat angkutan serta barang modal lainnya yang berasal dari produksi domestik diperoleh dengan cara mengekstrapolasi nilai investasi domestik pada satu tahun dasar dengan indeks produksi (tertimbang) masing-masing jenis barang modal.
3) Investasi berupa mesin-mesin, alat angkutan dan barang modal lainnya berasal dari impor diperoleh dengan men-deflate investasi dasar harga berlaku dengan IHPB dari masing-masing jenis barang modal pada masing-masing tahun.

2.1.11 ICOR

ICOR (Incremental Capital Output Ratio) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengevaluasi kegiatan perencanaan pembangunan yang terkait dengan investasi. Nilai ICOR menunjukkan jumlah investasi baru yang dibutuhkan untuk menaikkan/menambah satu unit output dalam perekonomian suatu wilayah. Besaran ICOR diperoleh dari perbandingan tambahan kapital terhadap tambahan output.

ICOR tersebut digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dari suatu investasi. Jika koefisien ICOR bernilai negatif atau nilainya relatif besar dapat dikatakan bahwa terjadi inefisiensi dalam investasi. Kondisi investasi yang efisien akan terjadi pada koefisien ICOR yang nilainya relatif kecil. Namun demikian, untuk menilai tingkat efisiensi suatu investasi juga mempertimbangkan

Analisis Ekonomi Makro Provinsi Kalimantan Utara

karakteristik perekonomian suatu wilayah apakah bersifat *capital intensive* atau *labor intensive*.

Nilai ICOR yang lebih rendah menunjukkan bahwa investasi lebih efisien dalam menghasilkan tambahan output atau pendapatan. ICOR yang rendah menunjukkan adanya efisiensi dalam penggunaan modal. Misalnya, jika suatu investasi memiliki ICOR=3, ini berarti satu unit investasi menghasilkan tiga unit tambahan output atau pendapatan. Dalam konteks ini, nilai ICOR=3 dianggap lebih baik daripada nilai ICOR=5, karena investasi dengan ICOR yang lebih rendah menghasilkan pertumbuhan yang lebih tinggi terhadap investasi yang ditanamkan atau dengan kata lain jangka waktu pengembalian modal relatif lebih cepat.

Efisiensi modal dalam berinvestasi merujuk pada kemampuan memanfaatkan modal atau sumber daya yang ditanamkan dalam suatu investasi dengan cara yang optimal, sehingga menghasilkan output atau keuntungan yang maksimal. Efisiensi ini dapat dicapai melalui berbagai faktor dan prinsip yang berkontribusi terhadap penggunaan modal yang bijaksana dan produktif. Widodo (2006) menyatakan bahwa, produktivitas investasi dapat dikatakan efisien apabila nilai ICOR berada pada kisaran=3.

ICOR merupakan ukuran perbandingan atau rasio antara investasi dengan output (Pendapatan Regional atau PDRB) yang dihasilkan. Dengan demikian, ukuran ICOR dapat diartikan sebagai besaran investasi (dalam unit moneter) yang dibutuhkan untuk dapat meningkatkan output (PDRB) satu unit moneter. Persamaan yang berhubungan dengan ICOR dapat dituliskan dalam bentuk diskret:

$$ICOR = \Delta K / \Delta Y \quad \text{.....(1)}$$

Keterangan:

ΔK = Investasi

Y = Produk Domestik Regional Bruto

ΔY = Tambahan Y (yaitu $Y_t - Y_{t-1}$)

Rumus (1) dapat didekati dengan:

$$ICOR = I / \Delta Y \quad \text{.....(2)}$$

Analisis Ekonomi Makro Provinsi Kalimantan Utara

Keterangan:

I = K

Bila menggunakan data rentetan waktu (*time-series data*) selama satu periode tertentu, maka ICOR dapat dihitung sebagai berikut:

$ICOR = \Sigma I_t / \Sigma \Delta Y_t$ ..... (3)

Dimana untuk kasus Kabupaten

ΣI_t = jumlah investasi selama tahun 2006-2010

$\Sigma \Delta Y_t$ = jumlah penambahan PDRB selama tahun 2006-2010

Untuk memperkirakan kebutuhan investasi, persamaan (3) dapat dibuat menjadi:

$\Sigma I_t = ICOR\ (\Sigma \Delta Y_t)$ ..... (4)

Persamaan di atas merupakan persamaan untuk memperkirakan kebutuhan investasi pada suatu periode, dengan syarat besaran ICOR sudah diketahui dan penambahan output atau PDRB (ΔY) sudah ditetapkan.

Jika mempunyai data ICOR dalam rentang waktu yang relatif panjang, maka rata-ratanya dapat digunakan untuk mengestimasi kebutuhan total investasi dalam mewujudkan suatu target pertumbuhan tertentu atau tingkat pertumbuhan output (PDRB) yang akan dihasilkan dari besaran investasi tertentu. Misalkan diasumsikan bahwa kelambanan antara investasi dan kenaikan output adalah satu periode, maka ICOR dapat dihitung dengan formula sebagai berikut.

Untuk perekonomian secara agregat

$$ICOR = \frac{I_{t-1}}{(GDP_t - GDP_{t-1})}$$

Untuk sektor atau industri i

$$ICOR_i = \frac{I_{t-1}}{(Output_{i,t} - Output_{i,t-1})}$$

Dimana It adalah investasi (bruto) pada periode t. Semakin rendah rasio tersebut maka semakin tinggi efisiensi investasi (Arsyad, 2010:186).

Analisis Ekonomi Makro Provinsi Kalimantan Utara

Ada beberapa catatan yang harus diperhatikan tentang rasio tersebut:

1) Pertumbuhan output tidak hanya dipengaruhi oleh investasi, tetapi juga variabel-variabel lainnya, seperti pertumbuhan dan produktivitas, utilisasi dan kapasitas produksi;
2) Ada faktor kelambanan (lag) 'investasi meningkatkan output' yang besarnya bervariasi antar waktu maupun antar sektor. Dengan demikian untuk mendapatkan nilai ICOR yang lebih *reliable*, pemerintah daerah harus menghitung data ICOR untuk jangka waktu yang relatif lama, misalnya 30 (tiga puluh) tahun atau 40 (empat puluh) tahun terakhir.

Cara yang lebih pragmatis untuk mendapatkan nilai ICOR dalam jangka waktu yang relatif panjang adalah dengan menggunakan formula di bawah ini. Untuk rumus yang di bawah, nilai ICOR dapat dihitung dari rasio antara rata-rata pangsa investasi pada PDRB dengan rata-rata pertumbuhan PDRB saja.

$$ICOR_{t,0} = \sum_{0}^{t-1} I\,/(PDRB_t - PDRB_0)$$

Metode menghitung ICOR dengan cara yang cepat adalah sebagai berikut:

$$ICOR = \frac{Rata - rata\ tahunan\ pangsa\ Investasi\ terhadap\ PDRB}{Rata - rata\ tahunan\ pertumbuhan\ PDRB}$$

Analisis Ekonomi Ma... Provinsi Kalimantan Utara

BAB 3
METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan dijabarkan mengenai metode penelitian yang akan digunakan pada Analisis Ekonomi Makro Provinsi Kalimantan Utara. Bab ini terdiri dari penjabaran metode pengumpulan data serta metode pengolahan dan analisis data yang digunakan selama penelitian.

2.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan metode atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan dan memperoleh data-data yang dibutuhkan selama penelitian berlangsung untuk menjawab tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Pengumpulan data merupakan persiapan awal kegiatan ini dengan mempersiapkan data-data yang dibutuhkan terkait dengan Analisis Ekonomi Makro Provinsi Kalimantan Utara. Selanjutnya dilakukan inventarisasi data dan informasi sebelum melakukan pengolahan dan analisis data.

Data yang digunakan pada analisis ekonomi makro adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang langsung diperoleh oleh pengumpul selama pekerjaan berlangsung sementara data sekunder adalah data yang sudah ada dan tidak dikumpulkan secara langsung oleh pengumpul data. Adapun data-data yang dibutuhkan selama pekerjaan ini berlangsung adalah sebagai berikut:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026;
2. Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Utara;
3. Indikator Kinerja Utama Provinsi Kalimantan Utara;
4. Data statistik ekonomi makro Provinsi Kalimantan Utara, termasuk di dalamnya statistik kuantitatif dan kualitatif.

Metode pengumpulan data sekunder yang dilakukan pada Analisis Ekonomi Makro Provinsi Kalimantan Utara adalah dengan menggunakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan data dari berbagai referensi dan informasi yang berkaitan dengan topik penelitian. Kepustakaan yang

Analisis Ekonomi Makro Provinsi Kalimantan Utara

digunakan pada penelitian ini adalah pustaka teknis yang berasal dari berbagai sumber seperti dokumen legal (peraturan daerah, dokumen perencanaan serta dan kebijakan lainnya), jurnal, artikel dan berbagai informasi yang berkaitan dengan topik penelitian.

2.4 Metode Pengolahan dan Analisis Data

Metode pengolahan dan analisis data merupakan metode atau cara yang dilakukan untuk menganalisis atau mengolah data-data yang telah dikumpulkan selama penelitian berlangsung untuk menjawab tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Adapun metode pengolahan dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari metode analisis deskriptif kuantitatif, deskriptif kualitatif dan metode proyeksi.

3.1.1 Analisis Deskriptif Kuantitatif

Analisis deskriptif digunakan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan atau menggambarkan hasil penelitian secara lebih jelas sehingga dapat dengan mudah dimengerti. Analisis deskriptif digunakan untuk menjelaskan informasi yang didapatkan dari hasil proses pengolahan data yang telah dilakukan dan dapat disajikan dalam bentuk narasi tertulis, grafik, diagram maupun tabel sederhana. Analisis ini hanya berupa akumulasi data dasar dalam bentuk deskripsi semata dalam arti tidak mencari atau menerangkan keterhubungan, menguji hipotesis, membuat ramalan atau menarik kesimpulan. Menurut Ali Muhson (2017), teknik analisis ini biasa digunakan untuk penelitian-penelitian yang bersifat eksplorasi. Biasanya teknik statistik yang digunakan adalah statistik deskriptif berupa:

1. Penyajian data dalam bentuk tabel atau distribusi frekuensi dan tabulasi silang. Dengan analisis ini akan diketahui kecenderungan hasil temuan penelitian, apakah masuk dalam kategori rendah, sedang atau tinggi.
2. Penyajian data data dalam bentuk visual seperti histogram, poligon, ogive, diagram batang, diagram lingkaran, diagram pastel dan diagram lambang.
3. Perhitungan ukuran tendensi sentral (mean, median, modus).
4. Perhitungan ukuran letak (kuartil, desil, persentil).
5. Perhitungan ukuran penyebaran (standar deviasi, varian, range, deviasi kuartil, mean deviasi dan sebagainya).

Analisis Ekonomi Makro Provinsi Kalimantan Utara

3.1.2 Analisis Deskriptif Kualitatif

Analisis deskriptif digunakan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan atau menggambarkan hasil penelitian secara lebih jelas sehingga dapat dengan mudah dimengerti. Analisis deskriptif digunakan untuk menjelaskan informasi yang didapatkan dari hasil proses pengolahan data yang telah dilakukan dan dapat disajikan dalam bentuk narasi tertulis, grafik, diagram maupun tabel sederhana. Dengan pendekatan analisis deskriptif kualitatif, maka akan ada banyak data yang terkumpul sebelum selanjutnya dianalisis.

Secara teknis, menurut Miles dan Huberman dinyatakan bahwa penelitian kualitatif analisis data dilakukan secara interaktif dan terus-menerus pada setiap tahapan penelitian mulai dari pengumpulan data sampai pada proses analisis dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 1984). Berikut ini beberapa model analisis kualitatis yang digunakan selama penelitian:

1. Reduksi data, yaitu proses merangkung, memilih hal-hal yang pokok dan memusatkan pada hal-hal yang penting dari seluruh data kasar yang muncul dari catatan-catatan saat pengumpulan data dan membuang data yang tidak perlu sehingga memberi gambaran yang lebih jelas.
2. Penyajian data, yaitu proses penyusunan informasi secara sistematis dalam rangka memperoleh kesimpulan sebagai temuan penelitian dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian atau narasi singkat, bagan, tabel, grafik, dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut maka data terorganisasikan sehingga akan semakin mudah dipahami.
3. Penarikan kesimpulan, yaitu memberikan kesimpulan terhadap hasil analisis atau penafsiran data dan evaluasi kegiatan yang mencakup pencarian makna serta pemberian penjelasan dari data yang telah diperoleh. Hasil yang didapatkan dari analisis kualitatif dapat berupa deskripsi atau narasi.

3.1.3 Metode Proyeksi

Metode proyeksi (*forecasting*) merupakan metode yang digunakan untuk meramalkan atau mengestimasi suatu kondisi di masa depan. Metode ini merupakan bagian dari metode analisis kuantitatif yang menggunakan data

Analisis Ekonomi Makro Provinsi Kalimantan Utara

numerik untuk pengolahannya. Ada berbagai jenis metode proyeksi yang dapat digunakan dalam statistik, masing-masing jenis digunakan tergantung pada kebutuhan penelitian. Metode proyeksi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode time series. Metode *time series* adalah metode proyeksi yang menggunakan analisis pola hubungan antara variabel yang akan diperkirakan dengan variabel waktu. Metode *time series* yang akan dikembangkan pada penelitian ini menggunakan bantuan aplikasi statistik SPSS.

Data proyeksi ekonomi makro sangat dibutuhkan dalam menyusun perencanaan pembangunan ekonomi. Ada dua jenis metode dalam teknik proyeksi yaitu metode kuantitatif dan metode kualitatif. Metode proyeksi kuantitatif menggunakan data kuantitatif di masa lalu untuk melakukan proyeksi pada periode yang akan datang, sementara metode proyeksi kualitatif bersifat subjektif dan berdasarkan pengalaman pengambil keputusan. Berikut adalah model-model yang digunakan pada proyeksi ekonomi makro dengan metode kuantitatif yaitu:

1. *Autoregressive Integrated Moving Average* (ARIMA)

   ARIMA merupakan metode yang umum digunakan untuk memprediksi suatu data. Metode ini berasal dari penggabungan antara model *Autoregressive* (AR) dan *Moving Average* (MA) yang dikembangkan oleh George Box dan Gwilym Jenkins. Menurut Box-Jenkins, metode ARIMA terdiri dari empat tahap yaitu identifikasi metode *time series*, pendugaan parameter-parameter bagi metode alternatif, pengujian metode, dan prakiraan nilai *time series* (Danitasari, 2015). Metode ARIMA memanfaatkan sepenuhnya data masa lalu dan sekarang untuk proyeksi (Anggriningrum *et al*., 2013). Metode ARIMA akan bekerja baik apabila data pada rentang waktu yang digunakan bersifat dependen atau berhubungan satu sama lain secara statistik.

2. *Double Exponential Smoothing* (DES)

   Metode *Double Exponential Smoothing* merupakan metode peramalan yang dikenalkan oleh C.C. Holt pada sekitar tahun 1958 (Hudiyanti, A. Bachtia, & Setiawan, 2019). Dalam metode ini dilakukan proses peramalan terus menerus secara menurun dengan menggunakan data baru dan diperlukan adanya penggunaan sebuah parameter α dengan

Analisis Ekonomi Makro Provinsi Kalimantan Utara

rentang nilai 0 sampai 1. Metode ini melakukan banyak perhitungan pemulusan (smoothing) sebanyak dua kali sehingga dinamakan Double Exponential Smoothing (Nurkahfi, Prakoso, & Wahanggara, 2016). Metode *Double Exponential Smoothing* meliputi metode Brown dan Holt. Perbedaan kedua metode tersebut terletak pada jumlah konstanta pemulusan yang digunakan, dimana metode Brown hanya menggunakan satu konstanta pemulusan, sedangkan metode Holt menggunakan dua konstanta pemulusan (Rabil, 2017). Nilai kedua parameter Holt ini harus dioptimalkan agar kombinasi keduanya dapat meminimalkan kesalahan peramalan. Tidak ada aturan khusus untuk mendapatkan dua parameter DES yang optimal. Umumnya, parameter dipilih berdasarkan intuisi prediktor atau melalui "uji coba".

3.1.4 Batasan Pembahasan Penelitian

Untuk memperoleh hasil kajian yang lebih komprehensif, penelitian ini tidak hanya menjelaskan data-data ekonomi makro eksisting Provinsi Kalimantan Utara secara deksriptif tapi juga membandingkan kondisi eksisting perekonomian makro Provinsi Kalimantan Utara dengan target capaian pembangunan ekonomi Provinsi Kalimantan Utara yang telah tertuang pada dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Utara. Kajian ini diharapkan dapat mengidentifikasi tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam mencapai target pembangunan ekonomi yang telah disusun sebelumnya dan selanjutnya memberikan rekomendasi yang dapat diimplementasikan dalam merencanakan target pembangunan ekonomi di masa yang akan datang. Berikut adalah lingkup analisis yang akan dilakukan pada penelitian ini:

1. Analisis perbandingan dan kesesuaian antara target pembangunan ekonomi RPJMD Provinsi Kalimantan utara dengan kondisi eksisting ekonomi makro Provinsi Kalimantan Utara.

   Analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi target pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan pada RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026 sebagai pengembangan visi dan misi Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Utara yang disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi sumber daya Provinsi Kalimantan Utara.

Analisis Ekonomi Makro Provinsi Kalimantan Utara

2. Perumusan rekomendasi kebijakan dan strategi yang perlu dilakukan untuk mendukung pembangunan ekonomi di Provinsi Kalimantan Utara. Rekomendasi kebijakan disusun berdasarkan hasil analisis perbandingan antara target pembangunan ekonomi dengan kondisi eksisting perekonomian Provinsi Kalimantan Utara. Rekomendasi kebijakan disusun sebagai bentuk antisipasi dan pertimbangan dalam penentuan target pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Utara di masa yang akan datang.

Analisis Ekonomi Makro Provinsi Kalimantan Utara

BAB 4
ANALISIS DAN PEMBAHASAN

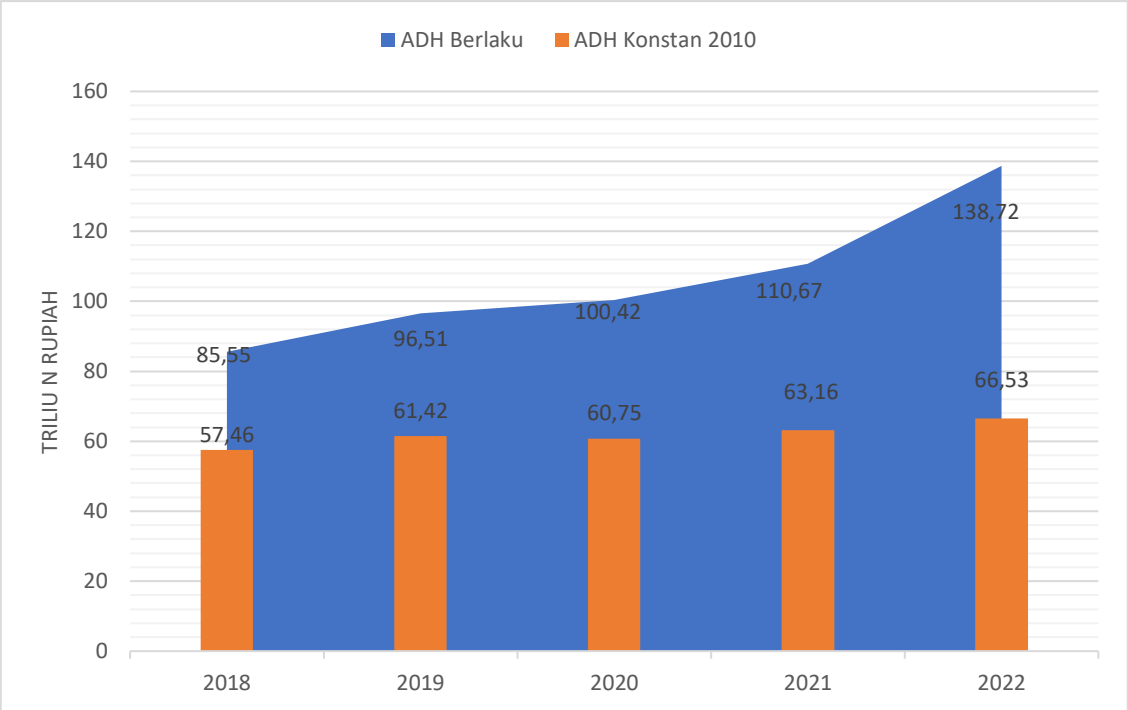
Pada bab ini akan dijabarkan mengenai hasil analisis dan pembahasan terhadap capaian indikator ekonomi makro di Provinsi Kalimantan Utara periode 2018-2022. Indikator ekonomi makro yang dianalisis meliputi perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), struktur ekonomi, laju pertumbuhan ekonomi (LPE), Indeks Williamson, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kemiskinan, indeks gini, ketenagakerjaan, inflasi, investasi, dan Incremental Capital Output Ratio (ICOR).

4.1 Produk Domestik Regional Bruto

Gejolak pasar global yang terjadi mulai tahun 2020 dan adanya pandemi Covid-19 dalam satu tahun terakhir ini secara tidak langsung telah memberikan dampak terhadap perekonomian Provinsi Kalimantan Utara. Nilai PDRB Provinsi Kalimantan Utara atas dasar dasar harga berlaku pada tahun 2022 mencapai 138,72 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan lebih dari dua puluh delapan triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2021 yang mencapai 110,67 triliun rupiah. Naiknya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha dan adanya inflasi.

Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB Kalimantan Utara mengalami kenaikan dari 63,16 triliun rupiah pada tahun 2021 menjadi 66,53 triliun rupiah pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan selama tahun 2022 Provinsi Kalimantan Utara mengalami pertumbuhan positif sebesar 5,34 persen. Kenaikan PDRB ini murni disebabkan oleh meningkatnya produksi barang dan jasa pada kategori tertentu dan dipengaruhi inflasi.

Analisis Ekonomi Makro Provinsi Kalimantan Utara



Gambar 4.1 Perkembangan Nominal PDRB Provinsi Kalimantan Utara 2018-2022 (Triliun Rupiah)
Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara

4.2 Struktur Ekonomi

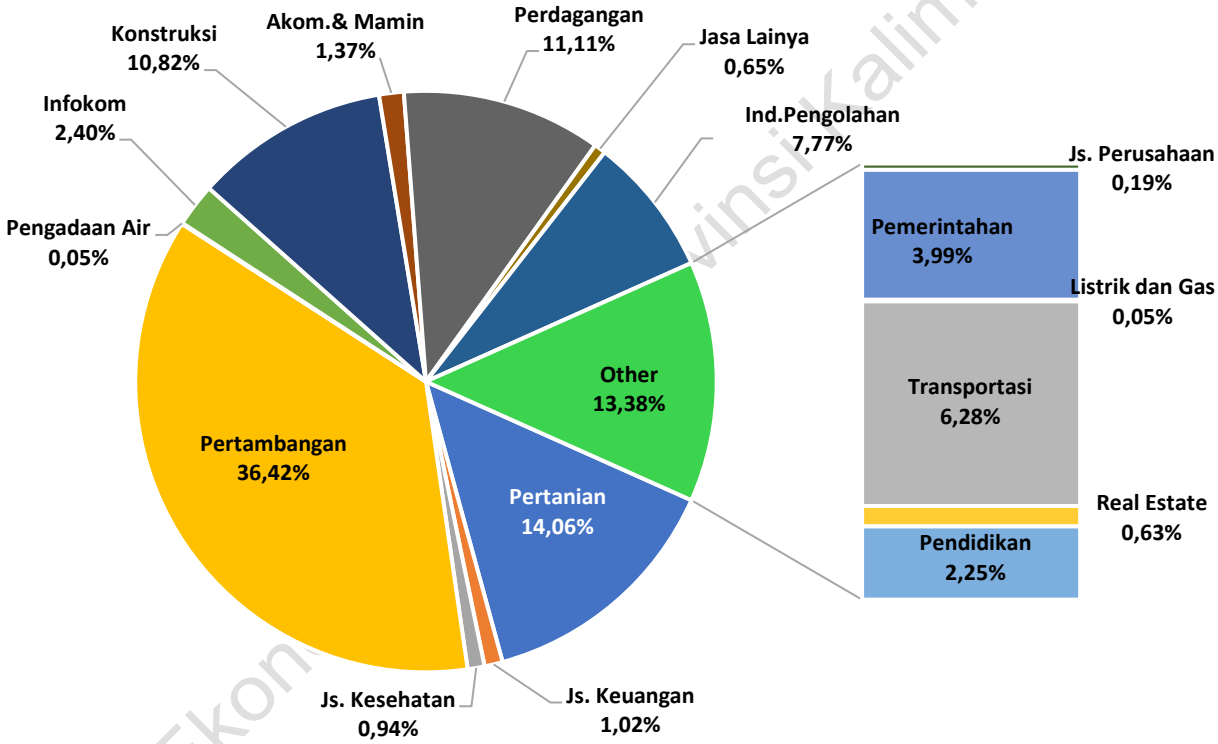
Selama lima tahun terakhir (2018-2022) struktur perekonomian Provinsi Kalimantan Utara didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, di antaranya Pertambangan dan Penggalian; Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; dan Industri Pengolahan. Peranan dari kelima kategori lapangan usaha ini menyumbang lebih dari 75 persen total PDRB Kalimantan Utara. Peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kalimantan Utara dapat dilihat dari dari Tabel 4.1.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2022 dihasilkan oleh lapangan usaha Pertambangan dan penggalian yaitu sebesar 36,42 persen (mengalami peningkatan dari 27,42 persen pada tahun 2018). Selanjutnya Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 14,06 persen (sedikit menurun peranannya dari 16,08 persen pada tahun 2018); Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 11,11 persen (sedikit menurun dari 11,68 persen pada tahun 2018); Konstruksi sebesar 10,82 persen (menurun dari 12,91 persen pada tahun 2018);

Analisis Ekonomi Makro Provinsi Utara

dan lapangan usaha Industri Pengolahan 7,77 persen (angka ini menurun dari 9,44 persen pada tahun 2018).

Di antara kelima lapangan usaha tersebut, Pertambangan dan penggalian merupakan kategori yang mengalami peningkatan peranan pada tahun 2022 dibandingkan tahun 2018. Sebaliknya; lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Industri Pengolahan; Konstruksi dan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor peranannya mengalami penurunan. Sementara itu, peranan lapangan usaha lainnya, masing-masing kurang dari 7 persen.



Gambar 4.2 Struktur Perekonomian Kalimantan Utara Tahun 2022
Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara

Tabel 4.1
Distribusi Persentase PDRB Kalimantan Utara Menurut Lapangan Usaha 2018-2022 (Persen)

LAPANGAN USAHA		2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	16,08	15,87	16,47	16,34	14,06

Analisis Ekonomi Provinsi Kalimantan Utara

LAPANGAN USAHA		2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
B	Pertambangan dan Penggalian	27,42	26,93	25,46	26,70	36,42
C	Industri Pengolahan/*Manufacturing*	9,44	9,20	9,17	8,97	7,77
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,05	0,05	0,06	0,06	0,05
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,06	0,06	0,06	0,06	0,05
F	Konstruksi	12,91	13,74	14,27	13,68	10,82
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11,68	12,01	12,18	12,52	11,11
H	Transportasi dan Pergudangan	7,11	7,05	6,75	6,31	6,28
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,64	1,62	1,53	1,51	1,37
J	Informasi dan Komunikasi	2,32	2,32	2,55	2,66	2,40
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,14	1,10	1,12	1,13	1,02
L	Real Estat	0,78	0,77	0,76	0,74	0,63
M,N	Jasa Perusahaan	0,23	0,22	0,23	0,22	0,19
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,05	4,96	4,96	4,69	3,99
P	Jasa Pendidikan	2,43	2,44	2,58	2,55	2,25
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,00	1,01	1,13	1,14	0,94
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,65	0,65	0,72	0,73	0,65
Produk Domestik Regional Bruto		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

** Angka sementara*
*** Angka sangat sementara*

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara

4.3 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kalimantan Utara selalu meningkat dalam lima tahun terakhir. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB Kalimantan Utara atas dasar harga konstan pada tahun 2022, mencapai 66,53 triliun rupiah. Angka tersebut mengalami kenaikan dari tahun yang sebesar 63,16 triliun rupiah.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Utara menunjukkan tren pertumbuhan positif kecuali tahun 2020 yang terjadi kontraksi.

Tahun 2018, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Utara tercatat sebesar 5,36 persen. Kalau dilihat menurut lapangan usaha, lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan makan Minum mengalami pertumbuhan terbesar yaitu sebesar 11,38 persen; diikuti Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 11,14 persen; Informasi dan Komunikasi sebesar 8,52 persen; Perdagangan Besar/Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda motor sebesar 8,31 persen dan Transportasi; Pergudangan sebesar 8,15 persen dan Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 8,09 persen. Lapangan usaha lainnya tumbuh kurang dari 8 persen.

Dalam tahun 2019 seluruh lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif, dimana pertumbuhan tertinggi sebesar 12,03 persen di lapangan usaha konstruksi; diikuti lapangan usaha Jasa Pendidikan (9,67%); lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 9,05 persen. Sedangkan lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan terendah adalah lapangan usaha Jasa Perusahaan yaitu sebesar 2,30 persen.

Tahun 2020, dimana terjadi wabah pandemi Covid-19, Kalimantan Utara terjadi kontraksi pertumbuhan sebesar 1,09 persen, dimana sumber kontraksi yang utama adalah lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian terkontraksi sebesar 6,77 persen; dikuti Penyediaan Akomodasi dan Makan minum sebesar 4,33 persen; Industri Pengolahan sebesar 3,84 persen; Transportasi dan Pergudangan sebesar 3,60 persen dan lapangan usaha Jasa Perusahaan sebesar 0,78 persen.

Tahun 2021, pasca pandemi Covid-19 perekonomian Kalimantan Utara mulai menunjukkan perbaikan dan pemulihan di semua lapangan usaha, sehingga dalam tahun 2021 Kalimantan Utara mampu tumbuh sebesar 3,98 persen. Kalau dicemati menurut lapangan usaha hanya ada satu lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan negatif (kontraksi) yaitu lapangan usaha Kontruksi. Sementara lapangan usaha lainnya tumbuh bervariasi, dan yang terbesar adalah lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (8,55%), diikuti lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 7,87 persen; Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 7,17 persen dan Perdagangan Besar, Eceran;

Analisis Ekonomi Makro Provinsi Kalimantan Utara

Reparasi Mobil dan Sepeda motor sebesar 7,16 persen. Sedangkan lapangan usaha lainnya tumbuh kurang dari 7 persen.

Tahun 2022, hampir semua lapangan usaha mulai menunjukkan pemulihan dan mendekati pertumbuhan sebelum pandemi Covid-19. Dari lapangan usaha yang ada, hanya ada satu lapangan usaha yang terjadi kontraksi (pertumbuhan negatif) yaitu lapangan usaha Konstruksi (2,02%). Sedangkan lapangan usaha lainnya mengalami pertumbuhan yang bervariasi, dimana yang terbesar adalah lapangan usaha Penyediaaan Makan dan Minum yaitu sebesar 10,94 persen; diikuti Transportasi dan Pergudangan sebesar 10,38 persen; Jasa lainnya sebesar 9,55 persen dan Perdagangan Besar, Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda motor sebesar 9,09 persen. Sedangkan lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan terkecil adalah Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 1,33 persen; diikuti Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial sebesar 3,05 persen; Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 3,70 persen dan Industri Pengolahan sebesar 3,95 persen. Lapangan usaha lainnya tumbuh antara 4 hingga 8 persen dalam tahun 2022.

Dengan demikian, dari 17 kategori lapangan usaha tersebut, banyak yang mengalami pertumbuhan positif pada tahun 2021-2022, yang mengindikasikan pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Tahun 2020 merupakan tahun yang penuh ketidakpastian dengan banyak lapangan usaha mengalami kontraksi. Ini menunjukkan betapa pentingnya pemahaman tentang dinamika ekonomi regional dan kemampuan untuk beradaptasi terhadap perubahan dalam mengelola pertumbuhan ekonomi. Data capaian masing-masing sektor lapangan usaha selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.2
Laju Pertumbuhan PDRB Kalimantan Utara Menurut Lapangan Usaha 2018-2022
(Persen)

LAPANGAN USAHA		2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,50	5,38	4,30	3,44	3,70
B	Pertambangan dan Penggalian	3,52	5,10	-6,77	6,78	7,10
C	Industri Pengolahan/*Manufacturing*	1,19	4,82	-3,84	2,50	3,95

Analisis Ekonomi Makro Provinsi Kalimantan Utara

LAPANGAN USAHA		2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
D	Pengadaan Listrik dan Gas	11,14	5,47	11,57	5,55	7,08
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,71	2,84	5,74	1,99	4,94
F	Konstruksi	7,14	12,03	0,24	-0,84	-2,02
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,31	8,95	0,45	7,16	9,09
H	Transportasi dan Pergudangan	8,15	6,98	-3,60	0,14	10,38
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	11,38	7,91	-4,33	2,75	10,94
J	Informasi dan Komunikasi	8,52	8,20	6,60	7,87	8,47
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	8,09	5,36	0,51	7,17	9,15
L	Real Estat	5,71	5,44	0,76	2,14	4,76
M,N	Jasa Perusahaan	3,26	2,30	-0,78	2,15	6,40
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,53	6,68	1,07	0,25	3,05
P	Jasa Pendidikan	4,99	9,67	6,20	4,61	6,69
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,69	9,05	10,05	8,55	1,33
R,S,T,U	Jasa lainnya	5,99	8,49	9,97	6,68	9,55
Produk Domestik Regional Bruto		5,36	6,89	-1,09	3,98	5,34
Produk Domestik Regional Bruto@		5,74	7,33	-0,90	4,01	5,49

@ : tanpa migas
** Angka sementara*
*** Angka sangat sementara*

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara

Berdasarkan tabel 4.2 dapat dicermati bahwa laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Utara mengalami fluktuasi pertumbuhan dengan tren posistif dari tahun 2018 hingga 2022, kecuali 2020 yang mengalami kontraksi sebesar 1,09 persen (dengan migas dan 0,90 persen tanpa migas). Pada tahun 2018 tumbuh sebesar 5,36 persen dan meningkat lagi tahun 2019 menjadi 6,89 persen, dan tahun 2020 terjadi kontraksi sebesar 1,09 persen. Sedangkan dalam 2 tahun terakhir pasca pandemi Covid-19 masing-masing tercatat sebesar 3,98 persen dan 5,43 persen. Kalau dicermati pertumbuhan ekonomi berdasarkan PDRB dengan mengeluarkan unsur minyak bumi dan gas (migas) serta pengolahannya,

Analisis Ekonomi Wilayah Provinsi Kalimantan Utara

dapat dilihat bahwa pertumbuhan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Utara tanpa migas cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan dengan migas.

Sebelum pandemi Covid-19, tahun 2018 tercatat sebesar 5,74 persen, 2019 tercatat sebesar 7,33 persen, 2020 tercatat terkontraksi sebesar 0,90 persen dan dalam dua tahun terakhir masing-masing tercatat 4,01 persen dan 5,49 persen. Apabila dibandingkan dengan angka pertumbuhan ekonomi nasional rata-rata pertumbuhan ekonomi Kalimantan Utara masih lebih baik dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional dalam kurun waktu yang sama.

Laju pertumbuhan PDRB Kalimantan Utara dapat dilihat sebagai berikut:

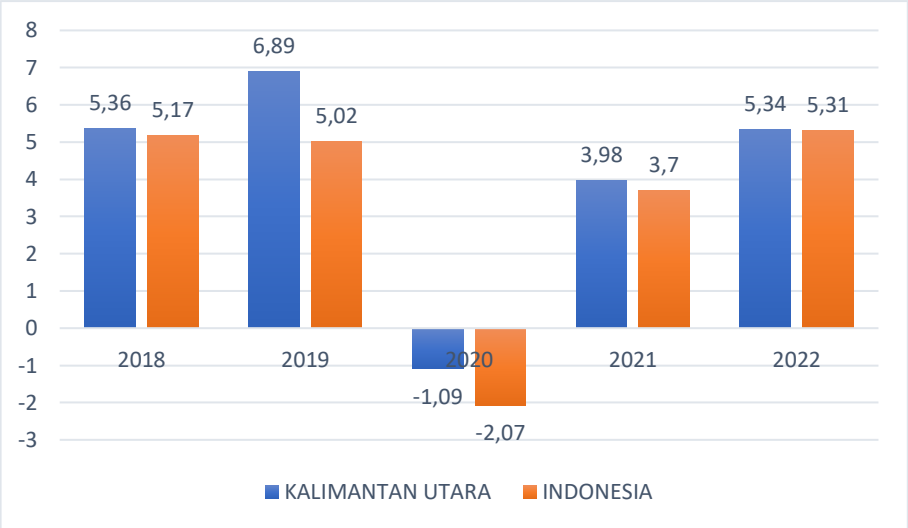


	2018	2019	2020	2021	2022
PDRB	5,36	6,89	-1,09	3,98	5,34
PDRB@	5,74	7,33	-0,9	4,01	5,49

Gambar 4.3 Laju Pertumbuhan PDRB Kalimantan Utara Tahun 2018-2022
Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara

Adapun perbandingan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Utara dengan pertumbuhan nasional dapat dilihat pada gambar 4.4:

Analisis Ekonomi Kalimantan Utara



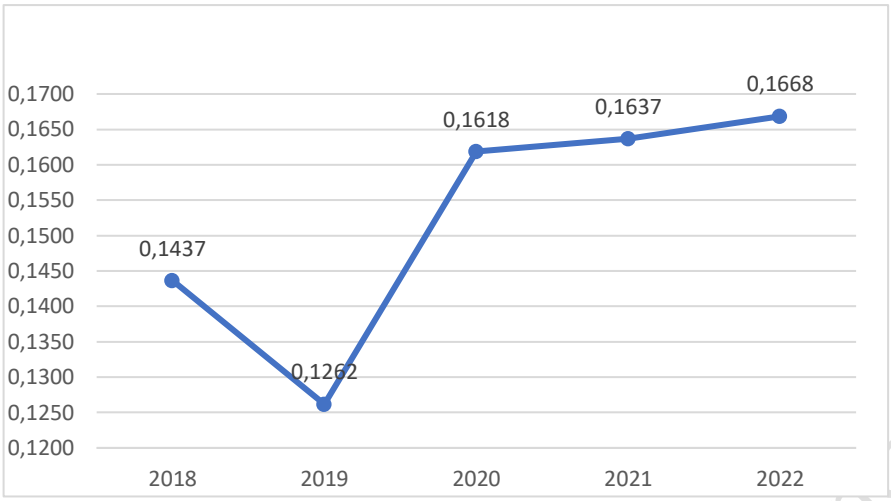
Gambar 4.4 Capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Utara dengan Laju Pertumbuhan Nasional
Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara

Pada gambar 4.4 dapat dilihat perbandingan kinerja ekonomi Provinsi Kalimantan Utara dengan rata-rata nasional selama periode yang sama, yaitu 2018 hingga 2022. Dalam periode ini, Provinsi Kalimantan Utara secara konsisten mencapai atau melebihi tingkat pertumbuhan ekonomi nasional, kecuali pada tahun 2020 saat keduanya mengalami kontraksi. Namun demikian, Provinsi Kalimantan Utara memiliki kontraksi yang lebih ringan dibandingkan dengan tingkat nasional.

4.4 Indeks Williamson

Penghitungan nilai Indeks Williamson melibatkan hubungan antara pendapatan regional per kapita dan jumlah penduduk masing-masing daerah. Dengan melakukan penghitungan tersebut dapat dilihat gambaran ketimpangan yang terjadi antar wilayah. Hasil penghitungan Indeks Williamson di Kalimantan Utara ditampilkan pada Gambar 4.5.

Analisis Ekonomi Makro Provinsi Kalimantan Utara



Gambar 4.5 Indeks Williamson Kalimantan Utara Tahun 2018-2022
Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara

Berdasarkan grafik yang ditampilkan pada gambar 4.5 menunjukkan bahwa Indeks Williamson di Kalimantan Utara pada tahun 2022 sebesar 0,1668. Berdasarkan kriteria yang ditampilkan pada gambar 4.5 menunjukkan bahwa ketimpangan di Kalimantan Utara rendah. Ketimpangan yang rendah berbanding terbalik dengan tingkat pemerataan yang tinggi, yaitu tingkat pembangunan antar wilayah di Kalimantan Utara dilaksanakan secara merata. Berdasarkan data Indeks Williamson di Kalimantan Utara pada 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pembangunan di Kalimantan Utara cenderung meningkat pada 3 (tiga) tahun terakhir, namun peningkatan tersebut masih dalam batas aman atau ketimpangan rendah.

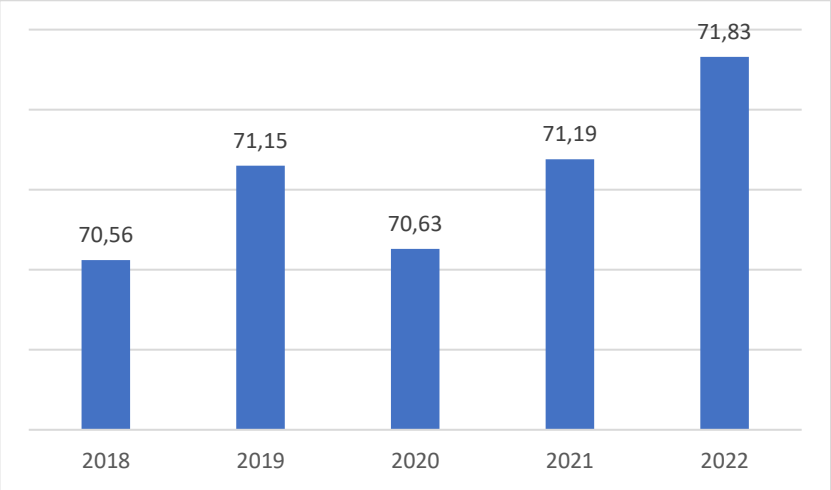
Penghitungan nilai Indeks Williamson sangat berpengaruh untuk memberikan gambaran bagi penyelenggaraan pembangunan di daerah, sekaligus membandingkan tingkat pembangunan daerah terhadap daerah sekitarnya yang menjadi tolok ukur dalam menilai kesejahteraan masyarakatnya. Oleh karena itu pentingnya suatu daerah untuk dapat menghitung nilai Indeks Williamson daerahnya, baik untuk capaian maupun proyeksinya. Proyeksi nilai Indeks Williamson Kalimantan Utara untuk tahun 2023 berada pada angka 0,1613. Proyeksi positif tersebut diharapkan dapat memotivasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam melakukan pembangunan yang merata di seluruh wilayah Kalimantan Utara, yang berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Analisis Ekonomi Makro Provinsi Kalimantan Utara

4.5 Indeks Pembangunan Manusia

Sebagai indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia, perkembangan IPM selalu dicatat dari tahun ke tahun sehingga analisis mengenai kondisi pembangunan manusia dapat dilakukan dengan dua perspektif yakni mencermati capaian di satu titik tahun tertentu dan menelaah lebih jauh perkembangan capaian antar waktu.

Secara umum, pembangunan manusia Kalimantan Utara terus mengalami kemajuan. Walaupun sempat mengalami penurunan pada 2020 akibat terdampak pandemi Covid-19, IPM Kalimantan Utara kembali menunjukkan peningkatan mulai tahun 2021. Hal ini seiring dengan pemulihan kinerja perekonomian dan penanganan pandemi Covid-19 yang berjalan baik.



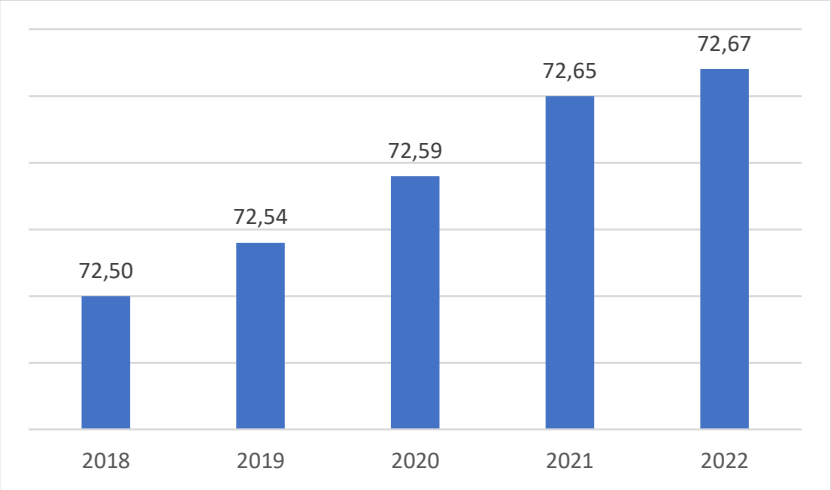
Gambar 4.6 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018-2022
Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara

Ketika virus Covid-19 masuk pada tahun 2020, IPM Provinsi Kalimantan Utara turun hingga 0,73 persen menjadi 70,56. Selanjutnya, di masa pemulihan ekonomi tahun 2021, IPM Provinsi Kalimantan Utara terus tumbuh hingga kini pada tahun 2022 mencapai 71,83. IPM Kalimantan Utara tumbuh 0,9 persen pada tahun 2022 jika dibandingkan tahun 2021. Angka ini lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan IPM pada kondisi normal sebelum pandemi Covid-19.

Dengan capaian IPM tahun 2022, status pembagunan manusia di Kalimantan Utara masih tetap berada di level “tinggi”. Jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia, IPM Kalimantan Utara berada pada urutan ke-21, naik 1 peringkat dibandingkan tahun sebelumnya.

Analisis Ekonomi Kalimantan Utara

Membaiknya pembangunan manusia di Kalimantan Utara didukung dengan peningkatan pada seluruh komponen penyusunnya, yaitu Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan Pengeluaran Riil per Kapita yang Disesuaikan.

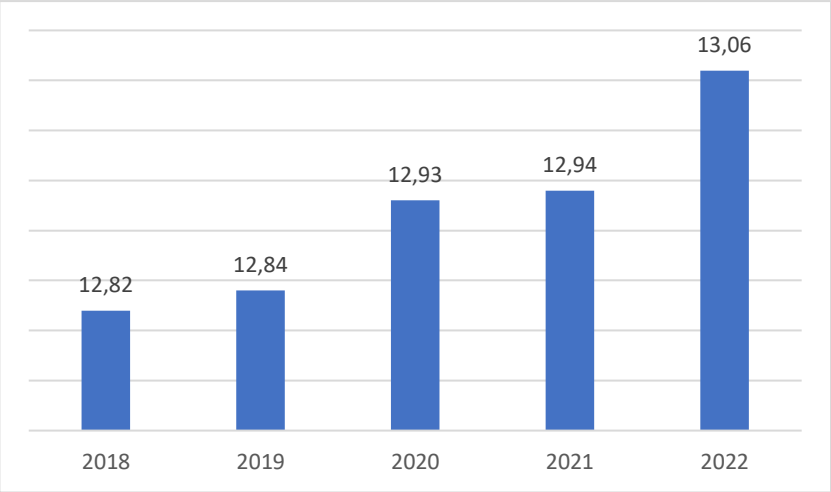


Gambar 4.7 AHH Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018-2022
Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara

AHH Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2022 mencapai 72,67 tahun. Dengan demikian, penduduk Provinsi Kalimantan Utara yang lahir pada tahun 2022 memiliki peluang hidup hingga usia 72 tahun 6 bulan. AHH Provinsi Kalimantan Utara terbilang cukup tinggi, bahkan telah melampaui AHH nasional yang hanya 71,85 tahun.

Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu HLS dan RLS. Penghitungan HLS mencakup pendidikan untuk penduduk yang berusia mulai dari tujuh tahun ke atas, sementara penghitungan RLS mencakup rata-rata lama sekolah dari penduduk yang berusia 25 tahun ke atas. Angka HLS dapat digunakan untuk meninjau keberhasilan program pendidikan dalam jangka waktu pendek, sedangkan dalam jangka panjang dapat dilihat dari angka RLS. Angka HLS dan RLS dapat memberikan gambaran tentang capaian dan penambahan sumber daya manusia berkualitas pada suatu daerah.

Analisis Ekonomi Makro Provinsi Kalimantan Utara

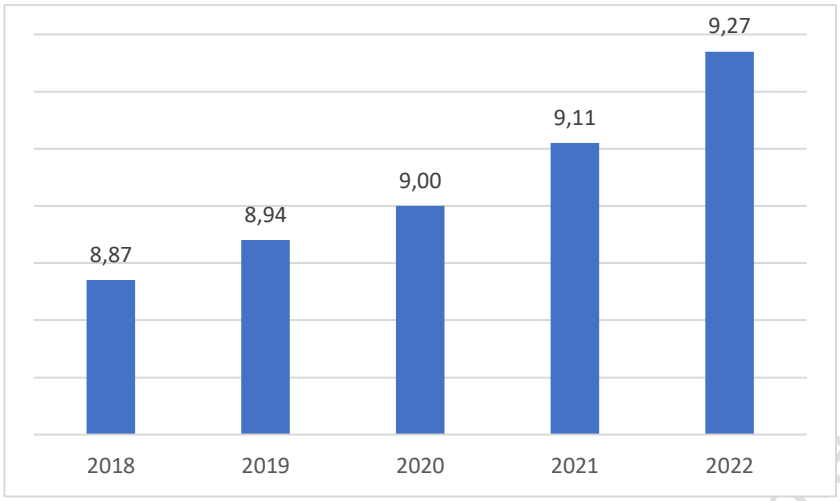


Gambar 4.8 HLS Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018-2022
Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara

Selama periode 2018 hingga 2022, HLS di Provinsi Kalimantan Utara meningkat 0,24 tahun, atau secara rata-rata tumbuh 0,46 persen per tahun. Meningkatnya HLS merupakan sinyal positif bahwa semakin banyak penduduk yang dapat menikmati bangku sekolah. Pada tahun 2022, HLS di Provinsi Kalimantan Utara telah mencapai 13,06 tahun yang berarti bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga lulus Diploma I.

Sementara itu, RLS penduduk usia 25 tahun ke atas di Provinsi Kalimantan Utara rata-rata tumbuh 1,11 persen per tahun selama periode 2018 hingga 2022. Pertumbuhan yang positif ini merupakan modal penting dalam membangun kualitas manusia di Provinsi Kalimantan Utara yang lebih baik. Pada tahun 2022, RLS penduduk Provinsi Kalimantan Utara usia 25 tahun ke atas mencapai 9,27 tahun atau dengan kata lain rata-rata penduduk usia 25 tahun ke atas telah menyelesaikan pendidikan hingga lulus SMP/sederajat.

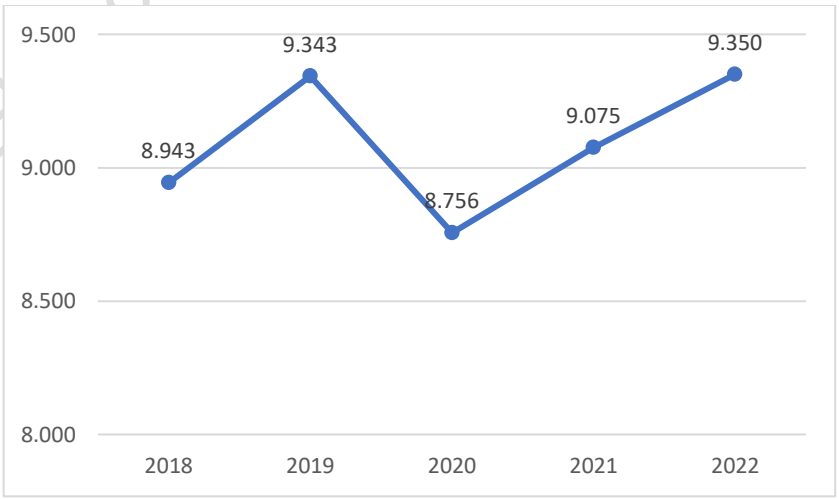
Analisis Ekonomi Makro Provinsi Kalimantan Utara



Gambar 4.9 RLS Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018-2022
Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara

Dimesi ketiga dari komponen IPM adalah standar hidup layak yang direpresentasikan oleh indikator pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan. Istilah 'yang disesuaikan' pada indikator ini merujuk pada besaran nilai pengeluaran per kapita penduduk yang telah distandarisasi dengan paritas daya beli (Purchasing Power Parity/PPP) untuk menjaga keterbandingan antar wilayah sehingga satu rupiah memiliki daya beli yang sama di semua wilayah.

Setelah sempat mengalami penurunan pada tahun 2020, pengeluaran per kapita riil mulai terus tumbuh sejak 2021 hingga 2022. Kondisi ini didorong dengan semakin membaiknya perekonomian di Kalimantan Utara seiring penanganan pandemi Covid-19 yang baik dan meningkatnya aktivitas ekonomi akibat berkurangnya berbagai pembatasan aktivitas masyarakat.



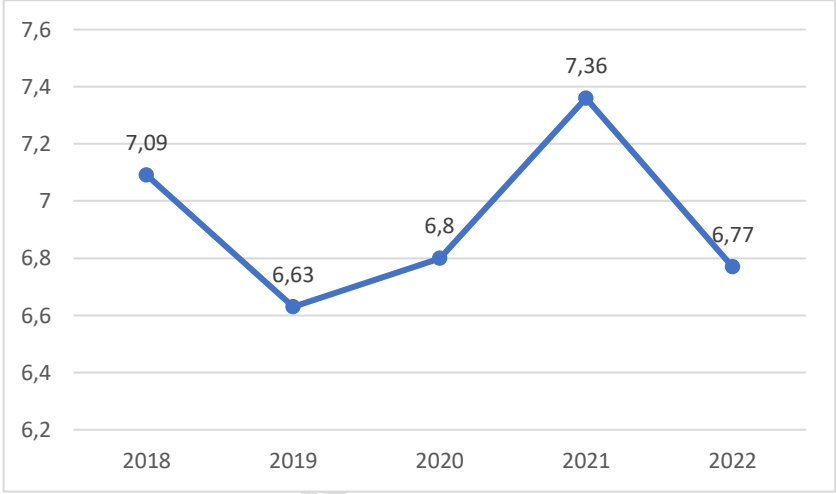
Gambar 4.10 RLS Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018-2022
Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara

Analisis Ekonomi Makro Provinsi Kalimantan Utara

Pada tahun 2022, pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan masyarakat Provinsi Kalimantan Utara mencapai 9,35 juta rupiah per tahun, meningkat 3,03 persen jika dibandingkan tahun sebelumnya. Angka ini juga sedikit lebih tinggi jika dibandingkan dengan pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan pada saat sebelum pandemi Covid-19 tahun 2019.

4.6 Kemiskinan

Berikut adalah persentase penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Utara dari tahun 2018 sampai tahun 2022.



Gambar 4.11 Persentase Penduduk Miskin Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018-2022
Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara

Tren kemiskinan di Provinsi Kalimantan Utara selama 2018-2022 cukup berfluktuatif. Persentase penduduk miskin yag sudah menurun pada 2019 mengalami peningkatan pada 2020-2021. Hal ini disebabkan adanya pandemi Covid-19 yang membawa berbagai dampak, utamanya pada akivitas perekonomian yang terhambat. Walaupun demikian, seiring membaiknya perekonomian, pada tahun 2022 kemiskinan di Provinsi Kalimantan Utara kembali menurun hingga 6,77 persen.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, penentuan penduduk miskin juga dipengaruhi oleh garis kemiskinan. Garis kemiskinan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada Maret 2022, garis kemiskinan Provinsi Kalimantan Utara sebesar 772.914 rupiah per kapita per bulan. Besaran garis kemiskinan ini terdiri dari garis kemiskinan makanan sebesar 566.292 rupiah per

Analisis Ekonomi Makro Provinsi Kalimantan Utara

kapita per bulan dan garis kemiskinan non makanan sebesar 206.622 rupiah per kapita per bulan. Jika dibandingkan menurut daerah, garis kemiskinan di daerah perkotaan lebih tinggi daripada perdesaan. Hal ini menggambarkan bahwa pemenuhan hidup di perkotaan lebih mahal dibandingkan dengan daerah perdesaan.

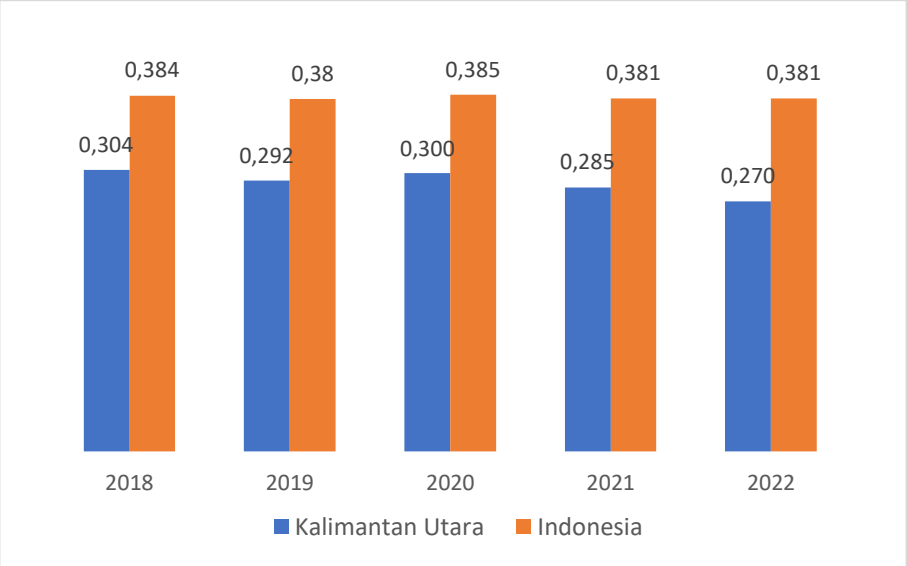
Tabel 4.3
Garis Kemiskinan Menurut Daerah Kota dan Desa Tahun 2018-2022
(Rupiah/Kapita/Bulan)

Tahun	Perkotaan	Perdesaan	Kota+Desa
2018	604.691	561.681	586.049
2019	679.660	609.733	651.416
2020	714.492	632.586	681.035
2021	739.267	665.963	710.994
2022	804.517	719.982	772.914

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara

4.7 Indeks Gini

Gambar 4.12 berikut menunjukkan perkembangan besarnya nilai indeks gini dan nasional dari tahun 2018 sampai tahun 2022.



Gambar 4.12 Perbandingan Indeks Gini Provinsi Kalimantan Utara dengan Nasional Tahun 2018-2022
Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara

Rata-rata nilai indeks gini Provinsi Kalimantan Utara tahun 2018-2022 lebih rendah daripada rata-rata capaian nasional. Secara keseluruhan, tingkat ketidakmerataan pendapatan di Kalimantan Utara cenderung lebih rendah daripada di seluruh Indonesia. Meskipun demikian, terlihat juga bahwa dari tahun

Analisis Provinsi Kalimantan Utara

2018 hingga tahun 2022 indeks gini di Kalimantan Utara mengalami penurunan secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketidakmerataan pendapatan di Provinsi Kalimantan Utara cenderung menurun seiring waktu.

Meskipun tingkat ketidaksetaraan pendapatan di kalimantan utara lebih rendah daripada rata-rata nasional, masih ada ketidaksetaraan pendapatan yang signifikan di Kalimantan Utara. Pemerintah dapat terus berupaya untuk mengurangi ketidakmerataan ini melalui kebijakan dan program yang lebih inklusif.

Perubahan dalam tingkat ketidakmerataan pendapatan bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan, program sosial, dan faktor-faktor lainnya.

4.8 Ketenagakerjaan

Data ketenagakerjaan memegang peranan penting dalam perencanaan pembangunan. Ketersediaan data ketenagakerjaan yang lengkap dan akurat akan memudahkan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat. Capaian status ketenagakerjaan di provinsi Kalimantan Utara dalam kurun waktu 2018-2022 dirincikan pada tabel 4.4.

Tabel 4.4
Status Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018-2022

Kategori	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Penduduk Usia Kerja	Jiwa	503.147	526.823	522.832	535.007	547.170
Angkatan Kerja	Jiwa	341.197	349.157	347.731	354.376	370.012
- Bekerja	Jiwa	323.400	333.777	330.441	338.152	353.984
- Pengangguran	Jiwa	17.797	15.380	17.290	16.224	16.028
Bukan Angkatan Kerja	Jiwa	161.950	177.666	175.101	180.631	177.158
Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,11	4,49	4,97	4,58	4,33

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara, diolah

Penduduk usia kerja (*working age population*) adalah penduduk berumur lebih dari 15 tahun. Dalam kurun waktu 2018 sampai dengan 2022, penduduk usia kerja di Provinsi Kalimantan Utara memiliki besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat rata-rata sebesar 1,69 persen per tahun. Pada Agustus tahun 2020, terdapat penurunan jumlah penduduk usia kerja yaitu

Analisis Ekonomi Makro Provinsi Kalimantan Utara

sebesar 3.991 jiwa. Hal ini disebabkan adanya pandemi Covid-19 pada tahun 2020 sehingga berdampak bagi angkatan kerja yang berhenti bekerja ataupun penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja. Meskipun terdampak Covid-19, kondisi penduduk usia kerja dalam kurun waktu dua tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga pada periode Agustus tahun 2022 penduduk usia kerja mencapai 547.170 jiwa.

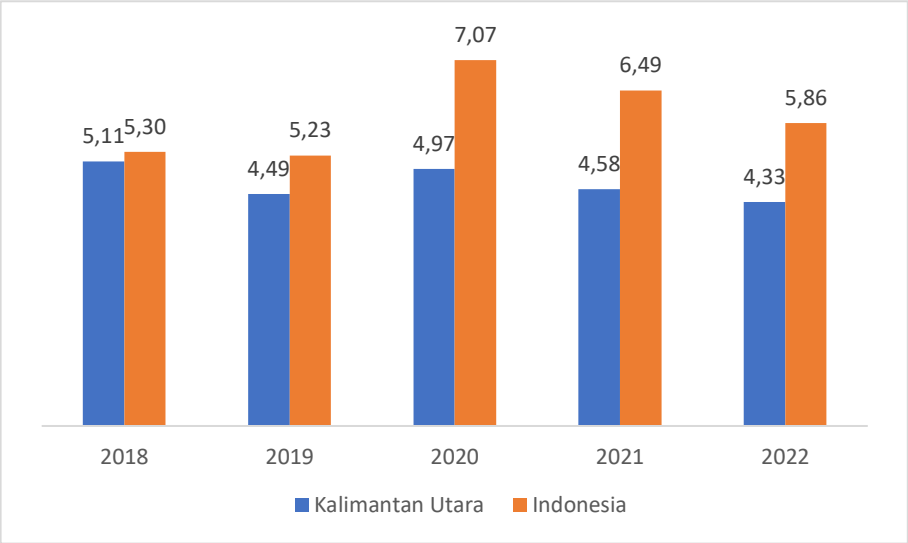
Penduduk usia kerja dibagi ke dalam angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja pada dasarnya merujuk pada kelompok penduduk yang berada pada pasar kerja, yaitu penduduk yang siap terlibat dalam kegiatan ekonomi produktif, dalam hal ini terdiri dari mereka yang bekerja dan menganggur. Menurut data Sakernas, penduduk usia kerja di Provinsi Kalimantan Utara kategori angkatan kerja lebih banyak dibandingkan kategori bukan angkatan kerja. Jumlah angkatan kerja di Kalimantan Utara selama kurun waktu 2018 sampai dengan tahun 2022 cenderung meningkat. Peningkatan angka angkatan kerja terbesar terjadi pada 2021-2022 yaitu sebesar 15.636 jiwa. Meskipun terjadi penurunan angkatan kerja pada tahun 2020 akibat Covid-19 sebesar 1.426 jiwa, namun kondisi tersebut kembali pulih ditandai dengan adanya peningkatan sebesar 6.645 jiwa pada 2021.

Di sisi lain, jumlah bukan angkatan kerja juga menunjukkan tren yang meningkat seiring pertumbuhan jumlah penduduk usia kerja. Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi. Meskipun menunjukkan tren yang meningkat, pada tahun 2022 jumlah penduduk usia kerja bertambah namun jumlah bukan angkatan kerja berkurang sebesar 3.473 jiwa atau 1,92 persen dibandingkan tahun 2021. Hal ini menunjukkan adanya subtitusi penduduk bukan angkatan kerja menjadi penduduk angkatan kerja yang siap bekerja. Subtitusi penduduk usia kerja ini juga menunjukkan semakin banyak penduduk produktif dalam dunia ketenagakerjaan di Kalimantan Utara.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kalimantan Utara menunjukkan kondisi yang semakin membaik. Meskipun sempat meningkat pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19, tren TPT Kalimantan Utara masih menunjukkan penurunan. Angka TPT tahun 2022

Analisis Ekonomi Makro Provinsi Kalimantan Utara

sebesar 4,33 persen yang berarti bahwa dari 100 orang angkatan kerja terdapat sekitar 4 orang yang menganggur. Turunnya TPT menandakan berkurangnya jumlah pengangguran di Provinsi Kalimantan Utara. Kondisi ini dipengaruhi oleh semakin terbukanya kesempatan kerja sehingga banyak tenaga kerja yang terserap dalam dunia kerja, baik di instansi pemerintahan, lapangan kerja di bidang industri, pertanian, dan bidang lainnya.



Gambar 4.13 Perbandingan TPT Provinsi Kalimantan Utara dengan Nasional Tahun 2018-2022
Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara, diolah

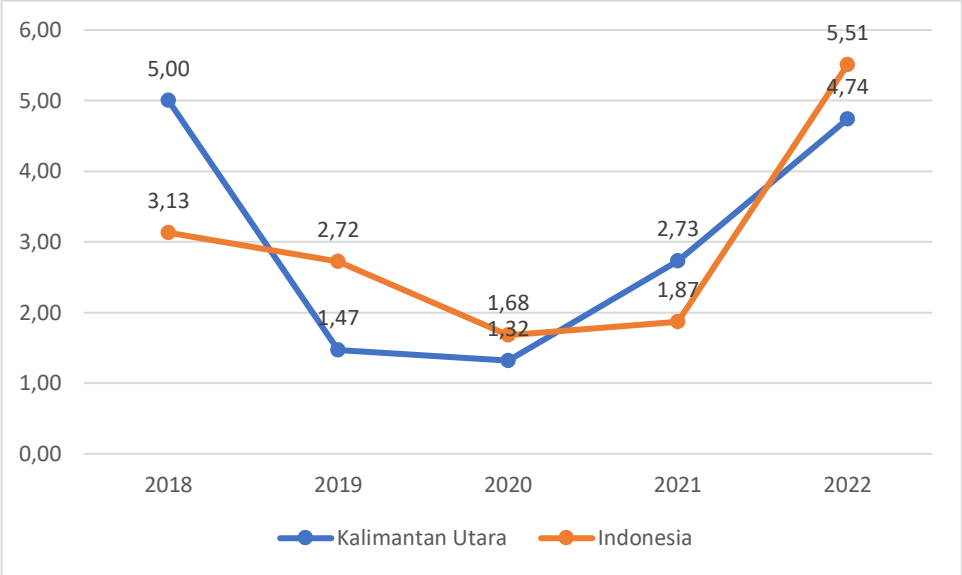
Jika dibandingkan dengan TPT nasional, capaian TPT Kalimantan Utara lebih baik dibandingkan TPT nasional selama kurun waktu 2018-2022. Hal tersebut dapat dilihat dari besaran TPT Kalimantan Utara yang semakin menurun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar -4,06 persen per tahun, sementara TPT nasional memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 2,54 persen per tahun.

4.9 Inflasi

Kota Tarakan dan Kota Tanjung Selor merupakan kota yang menjadi cakupan Survei Biaya Hidup (SBH) 2018 di Provinsi Kalimantan Utara. Inflasi Provinsi Kalimantan Utara dihitung menggunakan inflasi Kota Tarakan hingga akhir 2019 dengan SBH 2012. Namun, terhitung Januari 2020 inflasi Provinsi Kalimantan Utara merupakan agregat dari angka IHK dan inflasi dari gabungan Kota Tarakan dan Kota Tanjung Selor.

Analisis Ekonomi Makro Provinsi Kalimantan Utara

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, inflasi Provinsi Kalimantan Utara selama periode 2018 hingga 2022 dirincikan pada Gambar 4.14.



Gambar 4.14 Perkembangan Inflasi Provinsi Kalimantan Utara dengan Nasional Tahun 2018-2022
Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara

Terdapat penurunan dan peningkatan dalam rentang waktu yang relatif pendek. Hal ini menunjukkan sensitivitas ekonomi terhadap perubahan kondisi pasar, permintaan, dan faktor lainnya.

Pada tahun 2018, inflasi di Kalimantan Utara lebih tinggi daripada inflasi nasional. Ini menunjukkan bahwa biaya hidup dan harga barang dan jasa di Kalimantan Utara cenderung meningkat lebih cepat daripada rata-rata nasional.

Pada tahun 2019, inflasi di Kalimantan Utara lebih rendah daripada inflasi nasional. Hal ini menunjukkan perlambatan kenaikan biaya hidup di Kalimantan Utara dibandingkan dengan rata-rata nasional.

Pada tahun 2020, inflasi di Kalimantan Utara masih lebih rendah daripada inflasi nasional. Ini menunjukkan perlambatan kenaikan harga yang berlangsung secara umum.

Pada tahun 2021, inflasi di Kalimantan Utara kembali lebih tinggi daripada inflasi nasional. Ini bisa mengindikasikan beberapa faktor lokal atau sektor yang mempengaruhi kenaikan harga di wilayah tersebut.

Pada tahun 2022, inflasi di Kalimantan Utara lebih rendah daripada inflasi nasional. Meskipun keduanya tetap relatif tinggi, perbedaan ini menunjukkan

Analisis Ekonomi Makro Provinsi Kalimantan Utara

bahwa Kalimantan Utara mengalami peningkatan harga yang lebih lambat dibandingkan dengan rata-rata nasional.

Inflasi tersebut membandingkan nilai inflasi pada bulan Desember tahun berkenaan dengan inflasi bulan Desember tahun sebelumnya. Penghitungan tingkat inflasi di suatu daerah dipengaruhi oleh perubahan indeks harga konsumen dibandingkan dengan waktu sebelumnya.

4.10 Investasi

Dalam kurun waktu 2018-2019, komponen investasi fisik pada Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) maupun perubahan inventori mengalami peningkatan. Sementara pada tahun 2020, PMTB dan inventori mengalami penurunan, hal ini diakibatkan adanya pandemi Covid-19 yang melanda dunia. Peningkatan investasi fisik yang terjadi lebih pada tanaman yang menghasilkan secara berulang atau dalam PMTB diistilahkan *Cultivated Biological Resources* (CBR), contohnya adalah kepala sawit yang masih muda (belum menghasilkan). Pertumbuhan PMTB merupakan indikator kunci dalam pemulihan ekonomi. Untuk mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi diperlukan upaya yang cukup keras untuk meningkatkan laju pertumbuhan PMTB pada level 6-7 persen.

Tabel 4.5
Besarnya Investasi Provinsi Kalimantan Utara Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Investasi – PMTB (Juta Rp)	28.441.359,40	31.453.082,90	31.369.940,00	32.126.939,50	34.185.197,90
Share Terhadap PDRB (%)	33,25	32,59	31,24	29,03	24,64
Perubahan Inventori (Miliar Rp)	294.196,10	297.970,90	347.040,10	338.766,70	359.466,41
PMTB + P. Inventori (Milliar Rp)	28.735.555,50	31.751.053,80	31.716.980,10	32.465.706,20	34.544.664,31
Share Terhadap PDRB (%)	33,59	32,90	31,58	29,34	24,90

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara

Analisis Ekonomi Makro Provinsi Kalimantan Utara

4.11 ICOR

Angka ICOR Provinsi Kalimantan Utara Pada tahun 2018, adalah 6,27. Ini berarti bahwa dalam tahun tersebut, setiap unit tambahan investasi yang ditanamkan menghasilkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,27 unit tambahan output atau pendapatan. Meskipun nilai ICOR ini tidak ekstrem rendah, tetapi jika dibandingkan dengan nilai-nilai ICOR yang ideal, maka terdapat potensi untuk lebih mengoptimalkan investasi atau mengarahkan investasi ke lapangan usaha industri dan jasa guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Pada tahun 2019, terjadi penurunan signifikan dalam nilai ICOR menjadi 4,94. Penurunan nilai ICOR ini menunjukkan peningkatan produktivitas investasi, di mana investasi yang lebih sedikit diperlukan untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih besar. Ini bisa mengindikasikan adanya proyek-proyek yang lebih efisien atau perbaikan dalam alokasi sumber daya. Angka ICOR tahun 2020 bernilai negatif, ini menunjukkan bahwa perekonomian mengalami kondisi tidak bernilai tambah. Hal ini karena nilai perubahan PDRB yang menurun (negatif), sehingga meskipun nilai investasinya (PMTB dan perubahan inventori) mengalami peningkatan, tetapi karena angka penyebutnya negatif (perubahan PDRB) maka investasi yang terjadi tidak memberikan dampak terhadap perekonomian. Angka ICOR negatif dalam ekonomi tidak memberikan makna sehingga ICOR sebagai alat ukur tidak dapat berfungsi. Pada tahun 2021 menunjukkan angka yang positif menjadi 7,91. Meskipun demikian, jika dibandingkan dengan angka ICOR sebelum tahun 2020 (sebelum pandemi) angka ini lebih besar, dengan kata lain di tahun 2021 investasi yang ada tidaklah lebih efisien dibanding tahun 2019. Meskipun demikian, ICOR yang positif menunjukkan adanya pemulihan ekonomi menuju kondisi perekonomian yang semakin kondusif di Provinsi Kalimantan Utara. Pada tahun 2022, terjadi penurunan nilai ICOR menjadi 5,80. Meskipun tidak mencapai level seperti pada tahun 2019, penurunan nilai ICOR ini menunjukkan perbaikan dari tahun 2021. Hal ini bisa mengindikasikan usaha untuk lebih mengoptimalkan investasi dan meningkatkan produktivitas ekonomi.

Secara keseluruhan selama periode 2018-2022 nilai ICOR di Provinsi Kalimantan Utara mengalami fluktuasi yang mencerminkan dinamika investasi dan pertumbuhan ekonomi. ICOR merupakan hasil penghitungan dengan time-

Analisis Ekonomi Makro Provinsi Kalimantan Utara

lag 0, artinya hanya dilihat dampak investasi tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi pada tahun yang sama. Padahal, dilihat dari sifat investasi yang digunakan dalam menggerakkan perekonomian adalah investasi jangka panjang, yang mana ICOR perlu dihitung dalam suatu periode tertentu.

Perubahan dalam nilai ICOR dapat disebabkan oleh faktor-faktor seperti perubahan dalam alokasi investasi, perubahan dalam teknologi, perkembangan eksternal, atau faktor-faktor internal ekonomi suatu daerah. Efisiensi investasi dan produktivitas ekonomi mungkin memerlukan evaluasi lebih mendalam untuk mengidentifikasi penyebab fluktuasi dan peluang perbaikan.

Tabel 4.6
Besarnya Investasi dan ICOR Provinsi Kalimantan Utara ADHK Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Investasi – PMTB (Juta Rp)	18.076.668,80	19.314.804,10	18.771.273,10	18.862.027,60	19.305.749,20
Share Terhadap PDRB (%)	31,46	31,45	30,90	29,86	29,02
Perubahan Inventori (Milliar Rp)	236.645,70	246.255,10	281.515,60	252.102,20	255.516,00
PMTB + P.Inventori (Miliar Rp)	18.313.314,50	19.561.059,20	19.052.788,70	19.114.129,80	19.561.265,20
Share Terhadap PDRB (%)	31,87	31,85	31,36	30,26	29,40
ICOR	6,27	4,94	-	7,91	5,80

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara

Analisis Ekonomi Provinsi Kalimantan Utara

BAB 5
PROYEKSI

Pada bab ini akan dijabarkan mengenai hasil proyeksi terhadap indikator ekonomi makro di Provinsi Kalimantan Utara yang terdiri dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), laju pertumbuhan ekonomi (LPE), Indeks Williamson, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kemiskinan, indeks gini, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), inflasi, investasi, dan Incremental Capital Output Ratio (ICOR). Data yang digunakan dalam perhitungan proyeksi adalah data *time series* tahun 2013 sampai dengan tahun 2022.

Dengan memanfaatkan menu "*expert modeler*" pada aplikasi SPSS, maka akan dilakukan *forecasting* menggunakan metode yang dianggap paling baik. Berikut hasil perhitungan proses analisis proyeksi *time series* yang dilakukan.

5.1 Produk Domestik Regional Bruto

Menggunakan data PDRB atas dasar harga konstan untuk membandingkan PDRB dari tahun ke tahun lebih mudah dilakukan sehingga dapat lebih objektif melihat perubahan dalam ekonomi dan lebih mudah dalam mengindentifikasi tren jangka panjang.

Tabel 5.1
Hasil Proyeksi PDRB ADHK Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023-2024 (Triliun Rupiah)

No	Tahun	Metode Forecasting	Hasil Forecasting	Target RPJMD
1	2023	ARIMA	70,27	71,15
2	2024	ARIMA	74,41	75,26

Sumber: Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara, diolah

Dengan menggunakan metode *forecasting* ARIMA terlihat bahwa prediksi besarnya PDRB Provinsi Kalimantan Utara tahun 2023 sebesar 70,27 triliun rupiah, sedangkan target yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Utara tahun 2023 adalah 71,15 triliun rupiah. Hasil *forecasting* PDRB ADHK tahun 2023 kurang dari target yang ditetapkan dalam RPJMD. Ini menunjukkan bahwa berdasarkan model ARIMA yang digunakan, ekonomi Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2023 mungkin mengalami pertumbuhan yang sedikit lebih

Analisis Ekonomi Makro Provinsi Kalimantan Utara

lambat daripada yang diharapkan dalam RPJMD. Hal tersebut bisa menjadi perhatian bagi pemerintah daerah untuk memastikan bahwa langkah-langkah kebijakan yang tepat diambil untuk mencapai target tersebut atau untuk menyesuaikan target sesuai dengan kondisi aktual ekonomi.

Hasil *forecasting* PDRB ADHK tahun 2024 adalah 74,41 triliun rupiah, sedangkan target yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Utara tahun 2024 adalah 75,26 triliun rupiah. Hasil *forecasting* PDRB ADHK tahun 2024 juga sedikit di bawah target yang ditetapkan dalam RPJMD. Ini menunjukkan bahwa berdasarkan model ARIMA, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2024 mungkin masih kurang optimal untuk mencapai target RPJMD. Pemerintah daerah perlu mengevaluasi kebijakan ekonomi dan mengambil tindakan yang tepat untuk mencapai target ekonomi yang ditetapkan dalam RPJMD.

Adapun *forecasting* PDRB atas dasar harga berlaku dapat dilihat pada tabel 5.2.

Tabel 5.2
Hasil Proyeksi PDRB ADHB Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023-2024 (Triliun Rupiah)

No	Tahun	Metode Forecasting	Hasil Forecasting	Target RPJMD
1	2023	ARIMA	147,37	126,25
2	2024	ARIMA	156,01	136,65

Sumber: Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara, diolah

Hasil *forecasting* PDRB ADHB tahun 2023 adalah 147,37 triliun rupiah sedangkan target yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Utara tahun 2023 adalah 126,25 triliun rupiah. Hasil *forecasting* PDRB ADHB tahun 2023 jauh melebihi target yang ditetapkan dalam RPJMD. Hal ini merupakan indikasi positif yang menunjukkan bahwa ekonomi Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2023 diperkirakan akan tumbuh lebih cepat daripada yang diharapkan dalam RPJMD.

Hasil *forecasting* PDRB ADHB tahun 2024 adalah 156,01 triliun rupiah sedangkan target yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Utara tahun 2024 adalah 136,65 triliun rupiah. Hasil *forecasting* PDRB ADHB tahun 2024 juga melebihi target yang ditetapkan dalam RPJMD. Pertumbuhan yang lebih tinggi dari yang diharapkan dalam RPJMD bisa menjadi peluang untuk

Analisis Ekonomi Regional Provinsi Kalimantan Utara

pembangunan ekonomi yang lebih cepat dan berkelanjutan di wilayah Provinsi Kalimantan Utara.

Hasil *forecasting* PDRB ADHB melebihi target yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Utara, menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan lebih baik daripada yang diharapkan. Nilai PDRB ADHB cenderung jauh lebih tinggi daripada PDRB ADHK dalam setiap tahun yang diprediksi. Hal ini mengindikasikan bahwa sektor ADHB memiliki kontribusi yang lebih besar terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Utara daripada sektor ADHK. Kedua sektor ini menunjukkan pertumbuhan yang kuat dalam periode yang diprediksi, yang dapat mengindikasikan potensi perkembangan ekonomi yang positif di Provinsi Kalimantan Utara jika tren tersebut berlanjut.

5.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Metode yang digunakan dalam *forecasting* LPE Provinsi Kalimantan Utara adalah model ARIMA. Pada tabel 5.3 dapat dilihat hasil *forecasting* LPE Provinsi Kalimantan Utara yang disandingkan dengan proyeksi LPE yang tertuang dalam dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Utara tahun 2021-2026.

Tabel 5.3
Hasil Forecasting LPE Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023-2024 (Persen)

No	Tahun	Metode Forecasting	Hasil Forecasting	Target RPJMD
1	2023	ARIMA	5,62	5,36 - 6,26
2	2024	ARIMA	5,89	5,05 - 5,95

Sumber: Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara, diolah

Hasil *forecasting* LPE Provinsi Kalimantan Utara adalah sebesar 5,62, angka tersebut berada dalam rentang target 5,36-6,26 yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Dengan demikian, LPE Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2023 diproyeksikan cukup mendekati target yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD.

Hasil *forecasting* 5,89 juga berada dalam kisaran target RPJMD 5,05-5,95 untuk tahun 2024. Seperti pada tahun sebelumnya, ini menunjukkan bahwa hasil *forecasting* untuk tahun 2024 juga berada dalam rentang target yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Artinya, LPE Provinsi Kalimantan Utara pada tahun

Analisis Ekonomi Makro Provinsi Kalimantan Utara

2024 juga diproyeksikan cukup mendekati target yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD.

Hasil *forecasting* LPE Provinsi Kalimantan Utara untuk tahun 2023 dan 2024 ini berada dalam rentang target yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD. Hal ini menunjukkan bahwa metode *forecasting* ARIMA yang digunakan memberikan proyeksi yang cukup akurat dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam perencanaan pembangunan daerah.

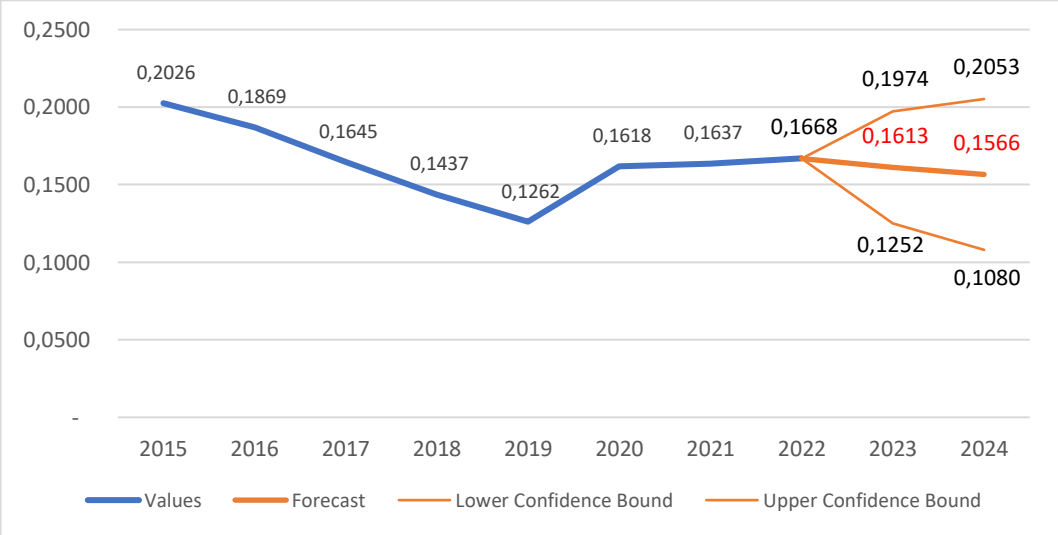
5.3 Indeks Williamson

Hasil *forecasting* Indeks Williamson Provinsi Kalimantan Utara tahun 2023-2024 menggunakan metode Eksponensial (Holt) dapat dilihat pada tabel 5.4.

Tabel 5.4
Hasil Forecasting Indeks Williamson Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023-2024

Timeline	Values	Forecast	Lower Confidence Bound	Upper Confidence Bound
2015	0,2026			
2016	0,1869			
2017	0,1645			
2018	0,1437			
2019	0,1262			
2020	0,1618			
2021	0,1637			
2022	0,1668	0,1668	0,1668	0,1668
2023		0,1613	0,1252	0,1974
2024		0,1566	0,1080	0,2053

Sumber: Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara, diolah



Gambar 5.1 Hasil Forecasting Indeks Williamson Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023-2024

Analis... Provinsi Kalimantan Utara

Berdasarkan nilai Indeks Willliamson tahun 2015-2022, didapatkan hasil *forecasting* untuk tahun 2023 adalah sebesar 0,1613 (normal, tingkat keyakinan 95%), untuk keyakinan di bawah 95% didapat angka sebesar 0,1252, sedangkan untuk keyakinan di atas 95% diperoleh angka sebesar 0,1974. Artinya, dengan keyakinan di bawah 95% maka tingkat kesenjangan semakin kecil antar wilayah, begitu juga sebaliknya untuk keyakinan di atas 95%, maka tingkat kesenjangan antar wilayah agak lebih besar. Namun demikian, Provinsi Kalimantan Utara masih berada di posisi angka yang masih wajar dan tergolong rendah karena masih di bawah angka 0,3900.

5.4 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Kalimantan Utara terus menunjukkan kemajuan dari tahun ke tahun, kecuali pada tahun 2020 saat pandemi Covid-19. Seiring pulihnya keadaan pasca Covid-19 dan mulai kembali menguatnya perekonomian, IPM diprediksi akan terus membaik dalam beberapa tahun ke depan. Hasil proyeksi IPM untuk tahun 2023-2024 dapat dilihat pada tabel 5.5.

Tabel 5.5
Hasil Forecasting IPM Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023-2024

No	Tahun	Metode Forecasting	Hasil Forecasting	Target RPJMD
1	2023	Eksponensial (Brown)	72,21	71,41
2	2024	Eksponensial (Brown)	72,65	71,58

Sumber: Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara, diolah

Hasil *forecasting* dengan menggunakan metode Eksponensial (Brown) menunjukkan IPM Provinsi Kalimantan Utara diprediksi mencapai 72,21 pada 2023 dan 72,65 pada 2024. Dengan capaian tersebut, status pembangunan manusia Kalimantan Utara masih berada pada kategori “Tinggi”.

Jika dibandingkan dengan target RPJMD, angka proyeksi IPM telah melampaui target yang telah ditentukan. Pada 2023, IPM Kalimantan Utara ditargetkan mencapai 71,41, sementara IPM diprediksi telah mencapai 72,21 pada tahun tersebut. Pada 2024, IPM Kalimantan Utara ditargetkan mencapai 71,58, sementara IPM diprediksi telah mencapai 72,65 pada tahun tersebut.

Analisis Ekonomi Makro Provinsi Kalimantan Utara

Dengan demikian, perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap target yang telah ditetapkan.

5.5 Kemiskinan

Selama lima tahun terakhir, angka kemiskinan cukup berfluktuatif. Walaupun demikian, persentase penduduk miskin terlihat mulai menurun pada 2022. Angka ini diprediksi dapat terus menurun seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian di Provinsi Kalimantan Utara. Hasil *forecasting* persentase penduduk miskin untuk tahun 2023-2024 dapat dilihat pada tabel 5.6.

Tabel 5.6
Hasil Forecasting Persentase Penduduk Miskin Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023-2024

No	Tahun	Metode Forecasting	Hasil Forecasting	Target RPJMD
1	2023	ARIMA	6,68	6,7 - 6,0
2	2024	ARIMA	6,59	6,1 - 5,9

Sumber: Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara, diolah

Hasil *forecasting* dengan menggunakan metode ARIMA menunjukkan persentase penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Utara diprediksi mencapai 6,68 persen pada 2023 dan 6,59 pada 2024. Jika dibandingkan dengan target RPJMD, angka prediksi ini telah sesuai dengan target yang telah ditentukan pada 2023. Namun, pada 2024 angka proyeksi masih belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Dengan demikian, perlu dirumuskan suatu kebijakan-kebijakan baru yang tepat dalam pengentasan kemiskinan di Provinsi Kalimantan Utara. Di samping itu, program-program daerah yang selama ini sudah dilakukan secara kontinu perlu dievaluasi efektivitasnya dan lebih ditingkatkan kembali.

5.6 Indeks Gini

Metode yang digunakan dalam *forecasting* indeks gini Provinsi Kalimantan Utara adalah model Eksponensial (Brown). Hasil *forecasting* indeks gini Provinsi Kalimantan Utara tahun 2023-2024 dapat dilihat pada tabel 5.7.

Analisis Ekonomi Makro Provinsi Kalimantan Utara

Tabel 5.7
Hasil Forecasting Indeks Gini Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023-2024

No	Tahun	Metode Forecasting	Hasil Forecasting	Target RPJMD
1	2023	Eksponensial (Brown)	0,269	0,283
2	2024	Eksponensial (Brown)	0,263	0,282

Sumber: Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara, diolah

Hasil *forecasting* menunjukkan bahwa nilai indeks gini pada tahun 2023 dan 2024 tidak jauh berbeda dibandingkan tahun sebelumnya yaitu tahun 2022. Indeks gini pada tahun 2023 (0,269) lebih rendah daripada target yang tertuang dalam dokumen RPJMD (0,283) dan indeks gini pada tahun 2024 (0,263) juga lebih rendah daripada target dalam dokumen RPJMD (0,282). Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2023 dan tahun 2024, ketidaksetaraan ekonomi di Provinsi Kalimantan Utara masih berada di bawah target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Berdasarkan hasil *forecasting* tersebut dapat dilihat bahwa terdapat tren penurunan indeks gini dari tahun 2023 ke tahun 2024. Penurunan indeks gini di bawah target RPJMD dapat dianggap sebagai pencapaian positif dalam upaya mengurangi ketidaksetaraan ekonomi. Hal ini mungkin mencerminkan efektivitas kebijakan sosial dan ekonomi yang diimplementasikan selama periode tersebut. Selain itu, indeks gini yang menurun dapat memiliki implikasi positif dalam hal pemerataan kekayaan dan akses ke sumber daya di Provinsi Kalimantan Utara. Adanya capaian indeks gini yang lebih rendah menunjukkan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara untuk mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Namun, penting untuk terus memonitor dan mengevaluasi upaya-upaya kebijakan yang dilakukan untuk memastikan bahwa ketidaksetaraan ekonomi terus berkurang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

5.7 Tingkat Pengangguran Terbuka

Hasil *forecasting* TPT Provinsi Kalimantan Utara tahun 2023-2024 dengan menggunakan metode Eksponensial (Brown) dapat dilihat pada tabel 5.8.

Analisis Ekonomi Makro Provinsi Kalimantan Utara

Tabel 5.8
Hasil Forecasting TPT Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023-2024

No	Tahun	Metode Forecasting	Hasil Forecasting	Target RPJMD
1	2023	Eksponensial (Brown)	4,07	4,45
2	2024	Eksponensial (Brown)	3,81	4,33

Sumber: Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara, diolah

Berdasarkan hasil proyeksi dari data periode-periode sebelumnya, Provinsi Kalimantan Utara akan dapat melampaui target TPT pada RPJMD baik di tahun 2023 maupun tahun 2024. TPT Kalimantan Utara diproyeksikan terus menurun menunjukkan perbaikan dalam aspek penyediaan lapangan pekerjaan dan daya serap tenaga kerja. Pada tahun 2023, TPT Kalimantan Utara diprediksi mencapai angka 4,07 dan berada pada angka 3,81 di tahun 2024. Hal ini dapat menjadi perhatian bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara untuk mengkaji ulang target-target indikator pembangunan yang ditetapkan setiap tahunnya mengingat proyeksi angka TPT yang menurun cukup signifikan.

5.8 Inflasi

Hasil *forecasting* inflasi Provinsi Kalimantan Utara tahun 2023-2024 dengan menggunakan metode ARIMA dapat dilihat pada tabel 5.9.

Tabel 5.9
Hasil Forecasting Inflasi Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023-2024

No	Tahun	Metode Forecasting	Hasil Forecasting	Target RPJMD
1	2023	ARIMA	4,55	-
2	2024	ARIMA	4,36	-

Sumber: Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara, diolah

Dari hasil *forecasting*, inflasi tahunan diproyeksikan sebesar 4,55 persen pada tahun 2023 dan 4,36 persen pada tahun 2024. Secara umum, hasil *forecasting* menunjukkan proyeksi inflasi tahunan yang relatif stabil mengalami kenaikan kecil selama tahun 2023 dan 2024 di Provinsi Kalimantan Utara.

Namun, perlu dicatat bahwa *forecasting* adalah perkiraan berdasarkan data historis dan metode statistik tertentu, sedangkan target yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Utara didasarkan pada tujuan dan kebijakan pemerintah yang lebih luas. Oleh karena itu, meskipun terdapat perbedaan

Analisis Ekonomi Makro Provinsi Kalimantan Utara

antara hasil *forecasting* dan target RPJMD, penting untuk melihatnya sebagai informasi tambahan dalam evaluasi dan perencanaan kebijakan untuk pengendalian inflasi di Provinsi Kalimantan Utara.

5.9 Investasi

Investasi merupakan kegiatan penciptaan tambah (*value added*) yang berakumulasi menjadi salah satu komponen dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat berkaitan erat dengan perkembangan investasi yaitu berupa nilai tambah oleh kegiatan investasi tersebut. Berikut dapat dilihat hasil *forecasting* investasi (ADHB) pada tabel 5.10 dan investasi (ADHK) pada tabel 5.11 dengan menggunakan metode Eksponensial (Brown).

Tabel 5.10
Hasil Forecasting Investasi (ADHB) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023-2024

No	Tahun	Metode Forecasting	Hasil Forecasting	Target RPJMD
1	2023	Eksponensial (Brown)	35.633.239,12	-
2	2024	Eksponensial (Brown)	37.150.723,54	-

Sumber: Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara, diolah

Nilai investasi yang tercipta dari perhitungan dengan menggunakan harga berlaku atau ADHB pada tahun 2023 mencapai 35,63 triliun rupiah dan di tahun 2024 sebesar 37,15 triliun rupiah. Perkembangan investasi mengalami peningkatan 4,26%. Peningkatan ini selain karena naiknya volume investasi juga dipengaruhi oleh satuan harga per unit investasi.

Tabel 5.11
Hasil Forecasting Investasi (ADHK) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023-2024

No	Tahun	Metode Forecasting	Hasil Forecasting	Target RPJMD
1	2023	Eksponensial (Brown)	19.550.234,83	-
2	2024	Eksponensial (Brown)	19.819.090,95	-

Sumber: Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara, diolah

Pada penghitungan investasi menggunakan harga konstan atau ADHK, nilai investasi pada tahun 2023 mencapai 19,55 triliun rupiah dan tahun 2024

Analisis Ekonomi Makro Provinsi Kalimantan Utara

sebesar 19,82 triliun rupiah atau mengalami pertumbuhan sebesar 1,38%. Angka ini menggambarkan riil investasi yang dipengaruhi oleh naiknya volume investasi.

Nilai investasi yang dihitung sebagaimana tabel 5.10 dan 5.11 di atas merupakan investasi yang dirinci menurut pelaku ekonomi seperti; investasi yang dilakukan oleh korporasi, pemerintah, rumah tangga, LNPRT, BUMN dan BUMD. Untuk melakukan analisis yang lebih dalam diperlukan penghitungan investasi lainnya seperti; investasi menurut pelaku ekonomi, menurut lapangan usaha; dan menurut barang modal sehingga untuk mewujudkannya perlu disusun dalam sebuah kajian matrik investasi Provinsi Kalimantan Utara.

5.10 ICOR

Tabel 5.12 mengilustrasikan proyeksi besarnya nilai ICOR dengan menggunakan metode ARIMA. Proyeksi nilai ICOR di tahun 2023 dan 2024 mengalami besaran yang menurun seperti yang terlihat pada tabel berikut.

Tabel 5.12
Hasil Forecasting ICOR Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023-2024

No	Tahun	Metode Forecasting	Hasil Forecasting	Target RPJMD
1	2023	ARIMA	5,33	-
2	2024	ARIMA	4,97	-

Sumber: Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara, diolah

Berdasarkan tabel 5.12 dapat dilihat bahwa proyeksi nilai ICOR Provinsi Kalimantan Utara tahun 2023 di level 5,33 dan pada tahun 2024 di level 4,97. Proyeksi ICOR dihitung menggunakan dasar harga konstan ADHK, hal ini untuk menghindari bias kenaikan harga (inflasi). Meskipun nilai ICOR Provinsi Kalimantan Utara masih berada di angka lebih dari 5, tetapi memiliki harapan bahwa tingkat produktivitas penciptaan output ekonomi semakin membaik/tinggi. Strategi yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah adalah melakukan intervensi agar investasi di Provinsi Kalimantan Utara diutamakan untuk investasi yang mempunyai produktivitas yang tinggi atau investasi yang dapat menimbulkan efek *multiplier* untuk berkembangnya sektor ekonomi lainnya.

Selain itu, dapat juga diarahkan ke lapangan usaha industri dan jasa sesuai dengan transformasi ekonomi dari lapangan usaha yang berbasis Sumber Daya

Analisis Ekonomi Makro Provinsi Kalimantan Utara

Alam (SDA) ke lapangan usaha industri dan jasa. Terobosan transformasi ekonomi di Provinsi Kalimantan Utara sudah terlihat di berbagai kegiatan guna menggali potensi yang dimiliki baik yang sudah beroperasi atau dalam taham konstruksi seperti; Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI), Pembangunan Industri Hilirisasi Gas (LNG mini) pertama di Indonesia, industri pembuatan alat angkut, industri kertas, kayu dan makan minum.

Analisis Ekonomi Makro Provinsi Kalimantan Utara

BAB 6
KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

Pada bab ini akan dijabarkan mengenai rangkuman dari seluruh pembahasan terhadap analisis ekonomi makro Provinsi Kalimantan Utara. Bab ini terdiri dari kesimpulan dan implikasi kebijakan terhadap pembangunan ekonomi di Provinsi Kalimantan Utara ke depan.

6.1 Kesimpulan

Dari analisis pada bab 4 dan bab 5, dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Dalam kurun waktu 2018-2022, pada umumnya indikator perekonomian di Provinsi Kalimantan Utara mengalami peningkatan kinerja (PDRB dan pertumbuhannya meningkat, IPM meningkat, indeks gini menurun, TPT menurun, ICOR menurun) dan mengalami penurunan kinerja pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19. Selama periode 2018-2022, struktur perekonomian Provinsi Kalimantan Utara didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, di antaranya Pertambangan dan Penggalian; Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; dan Industri Pengolahan. Peranan dari kelima kategori lapangan usaha ini menyumbang lebih dari 75 persen total PDRB Kalimantan Utara. Dari 17 kategori lapangan usaha, banyak yang mengalami pertumbuhan positif pada tahun 2021-2022, yang mengindikasikan pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Pada tahun 2022, inflasi di Kalimantan Utara lebih rendah daripada inflasi nasional. Meskipun keduanya tetap relatif tinggi, perbedaan ini menunjukkan bahwa Kalimantan Utara mengalami peningkatan harga yang lebih lambat dibandingkan dengan rata-rata nasional. Rata-rata nilai indeks gini Provinsi Kalimantan Utara tahun 2018-2022 lebih rendah daripada rata-rata capaian nasional artinya tingkat ketidakmerataan pendapatan di Kalimantan Utara cenderung lebih rendah daripada di seluruh Indonesia. Indeks Williamson masih berada pada kondisi yang relatif sama dengan tahun-tahun sebelumnya, ada sedikit perubahan tetapi tidaklah signifikan. Tingkat

Analisis Ekonomi Makro Provinsi Kalimantan Utara

ketimpangan pembangunan di Kalimantan Utara cenderung meningkat pada tiga tahun terakhir, namun peningkatan tersebut masih dalam batas aman atau ketimpangan rendah. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, TPT menunjukkan kondisi yang semakin membaik. Meskipun sempat meningkat pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19, tren TPT Kalimantan Utara masih menunjukkan penurunan hingga tahun 2022. Secara keseluruhan selama periode 2018-2022, nilai ICOR di Provinsi Kalimantan Utara mengalami fluktuasi yang mencerminkan dinamika investasi dan pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2021, ICOR menunjukkan angka yang positif menjadi 7,91. Namun, jika dibandingkan dengan angka ICOR sebelum tahun 2020 (sebelum pandemi) angka tersebut lebih besar, dengan kata lain di tahun 2021 investasi yang ada tidaklah lebih efisien dibanding tahun 2019.

2. Dengan metode proyeksi (*forecasting*) *time series* menggunakan 3 (tiga) model yaitu ARIMA, Eksponensial (Brown) dan Eksponensial (Holt), hasil proyeksi pada tahun 2023-2024 menunjukkan PDRB ADHK dan ADHB mengalami peningkatan, begitu juga dengan LPE. Hasil proyeksi LPE berada dalam rentang target yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD. Indeks Williamson menunjukkan angka yang relatif sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Angka IPM diproyeksikan melampaui target yang telah ditentukan dalam RPJMD. Angka kemiskinan diproyeksikan dapat terus menurun seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian di Kalimantan Utara. Sama halnya dengan kemiskinan, indeks gini pun diproyeksikan menurun dari tahun 2023 ke tahun 2024. Penurunan indeks gini di bawah target RPJMD menunjukkan adanya indikasi pencapaian positif dalam upaya mengurangi ketidaksetaraan ekonomi. TPT diperkirakan dapat melampaui target TPT pada RPJMD baik di tahun 2023 maupun tahun 2024, artinya ada perbaikan dalam aspek penyediaan lapangan pekerjaan dan daya serap tenaga kerja. Inflasi tahunan diperkirakan relatif stabil mengalami kenaikan kecil, investasi diperkirakan akan mengalami peningkatan baik investasi ADHB maupun ADHK, dan ICOR diperkirakan akan menurun dari tahun 2023 ke 2024 sehingga

Analisis Ekonomi Makro Provinsi Kalimantan Utara

memiliki harapan bahwa tingkat produktivitas penciptaan output ekonomi semakin membaik.

6.2 Implikasi Kebijakan

Mencermati laju pertumbuhan ekonomi dan struktur ekonomi dalam beberapa tahun terakhir, menimbulkan pertanyaan sebagai berikut:

a. Apakah pembangunan sudah merata atau ketimpangan pembangunan rendah?
b. Apakah masyarakat benar-benar sudah menikmati pembangunan yang dilakukan?
c. Bagaimana peran SDA dalam pembangunan ekonomi?

Dari beberapa pertanyaan di atas, maka implikasi ekonomi makro dapat dijawab dengan pergeseran kekuatan ekonomi berbasis SDA ke industri dan jasa. Tentu pergeseran ini tidak akan terjadi secara instan, proses transisi ekonomi akan berlangsung selama tiga sampai empat tahun. Proses transisi terjadi pada awal dimulainya konstruksi sebagai dampak dari peningkatan investasi yang signifikan. Pesatnya perluasan infrastruktur, gedung-gedung, pabrik pengolahan, pelabuhan, dan berbagai proyek besar maupun anak perusahaan akan menciptakan produksi industri baru yang dapat digunakan untuk pasar regional, nasional, bahkan global.

Pergeseran struktur perekonomian dapat memberikan dampak positif terhadap kemajuan pembangunan dengan memperhatikan partisipasi seluruh lapisan masyarakat. Hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu:

1. Kesiapan dan Ketersediaan Bahan Pangan

   Lapangan usaha pertanian merupakan lapangan usaha yang memberi andil terhadap pertumbuhan ekonomi, tapi lebih dominan pada sub lapangan usaha perkebunan, kehutanan dan perikanan. Hal ini didukung karena memiliki lahan yang luas dan garis pantai yang panjang. Di sisi lain, sub lapangan usaha tanaman bahan makanan, peternakan dan perburuan masih relatif kurang maksimal.
2. Tingginya aktivitas di sektor konstruksi karena adanya penanaman investasi sangat memerlukan berbagai kebutuhan bahan pokok makanan

Analisis Ekonomi Makro Provinsi Kalimantan Utara

berupa produk dari padi dan palawija serta hortikultura. Selain produk turunan padi dan palawija, berbagai produk hasil peternakan baik berupa daging maupun telur juga diperlukan. Permintaan terhadap berbagai produk tersebut disebabkan oleh pertumbuhan dan perkembangan tenaga kerja di wilayah KIHI atau kawasan sentral industri di Kalimantan Utara.

3. Pendidikan merupakan bidang pembangunan yang membutuhkan perhatian serius pemerintah dan masyarakat karena tingginya permintaan akan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh berbagai pelaku usaha di lapangan usaha kontruksi dan industri pengolahan. Kesiapan di bidang pendidikan merupakan salah satu upaya dan tantangan yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat untuk menghadapi gelombang pergeseran ekonomi dari berbasis SDA ke industri pengolahan, jasa dan perdagangan di masa depan.

Analisis Ekonomi Makro Provinsi Kalimantan Utara

DAFTAR PUSTAKA

Anggriningrum, D.P., Hendikawati, P., dan Abidin, Z. (2013). Perbandingan Prediksi Harga Saham dengan Menggunakan Jaringa Syaraf Tiruan Backpropagation dan ARIMA. *Unnes Journal of Mathematics.* 2(2): 105-109.

Arsyad, Lincolin. (2010). Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE.

Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Utara. (2023). Provinsi Kalimantan Utara Dalam Angka 2023.

Bappeda DIY. (2022). Penyusunan Analisis Ekonomi Makro Ekonomi DIY Tahun 2022.

Christianingrum, R., & Syafri, R. A. (2019). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Inflasi Inti di Indonesia. Jurnal Budget: Isu dan Masalah Keuangan Negara, 4(2), 18-39

Danitasari F. Perbandingan Prediksi Sifat Hujan Bulanan Antara Analisis Komponen Utama Model Arima dan Metode Probabilitas di Stasiun Meteorologi Pongtiku Tana Toraja. Jurnal Meteorologi Klimatologi dan Geofisika. 2015;2(2):207–215.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tebing Tinggi. (2023). Analisis Ekonomi Makro Kota Tebing Tinggi.

Hudiyanti, C.V., Bachtiar, F.A. dan Setiawan, B.D. (2019). Perbandingan Double Moving Average dan Double Exponential Smoothing untuk Peramalan Jumlah Kedatangan Wisatawan Mancanegara di Bandara Ngurah Rai. Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer. 3, 3 (Jan 2019), 2667–2672.

Kuncoro, M. (2004). Otonomi Daerah dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang. Jakarta: Erlangga.

Maipita, Indra. (2014). Mengukur Kemiskinan dan Distribusi Pendapatan. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Mankiw, N. Gregory. (2007). Makroekonomi. Edisi Keenam. Jakarta (ID): Erlangga.

Analisis Ekonomi Makro Provinsi Kalimantan Utara

Miles, M. B., & Huberman, A. (1984). Analisis Data Kualitatif-Terjemahan. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Nurkahfi, M. B., Prakoso, B. H., & Wahanggara, V. (2016). Perbandingan Metode Double Exponential Smoothing dan Least Square Untuk Sistem Prediksi Hasil Produksi Teh (Studi Kasus: PTPN XII Persero Kebun Bantaran Kabupaten Blitar).

Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara. (2021). Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara. (2022). Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Rabil, M. (2017). Peramalan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Metode Double Exponential Smoothing dan Double Moving Average. Surabaya: Departemen Statistika Bisnis.

Todaro, M.P. (2000). Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Jakarta: Erlangga.

Waluyaningsih VD dan Setiawan AH. (2020). Analisis Ketimpangan Pendapatan Antarwilayah di Kawasan Kedungsepur, Barlingmascakeb, dan Subosukawonosraten Periode 2008-2017. Diponegoro Journal Of Economics: 9(2).

Widodo, T. (2006). Perencanaan Pembangunan: Aplikasi Komputer Era Otonomi Daerah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Analisis Ekonomi Makro Provinsi Kalimantan Utara